



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA



Kinerja APBN Terus Dijaga untuk Keberlanjutan
Pemulihan Ekonomi

Scan dan Unduh
APBN KITA





“Ekonomi Indonesia dan momentum pemulihan masih terus berjalan dengan baik, dan ini akan terus terjaga seiring dengan kegiatan ekonomi masyarakat yang akan terus meningkat, terutama menjelang Idul Fitri, dimana mobilitas akan meningkat.

Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah.”

**Menteri Keuangan,
Sri Mulyani Indrawati**

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	7
Postur APBN	17
Perkembangan Ekonomi Makro	21
Laporan Khusus	24
Penerimaan Pajak	55
Penerimaan Bea dan Cukai	67
Penerimaan Negara Bukan Pajak	73
Belanja Pemerintah Pusat	81
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	89
Pembiayaan Utang	95





Diterbitkan oleh: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pelindung: Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan.

Pengarah: Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Keuangan

Penanggung Jawab: Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Sekretaris *Asset-Liability Committee* Kementerian Keuangan. **Pemimpin Redaksi:**

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. **Dewan**

Redaksi: Tim Deputies *Asset-Liability Committee* Kementerian Keuangan. **Tim Redaksi:** Tim

Teknis *Asset-Liability Committee* Kementerian Keuangan **Desain**

Grafis, Layout dan Foto: Biro KLI Kementerian Keuangan. **Alamat**

Redaksi: Gedung Frans Seda Lantai 8, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta.

Pendapatan Negara sebesar Rp500,99 triliun atau meningkat 32,06 persen (*yoy*) dari target pada APBN 2022. Capaian tersebut lebih tinggi Rp121,62 triliun dari periode yang sama tahun lalu. Realisasi tersebut terdiri atas Penerimaan Pajak sebesar Rp322,46 triliun atau telah mencapai 25,49 persen terhadap target pada APBN 2022 dan tumbuh 41,36 persen (*yoy*), serta Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp79,32 triliun atau telah memenuhi 32,37 persen dari target pada APBN 2022. Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai tersebut tumbuh 27,34 persen (*yoy*).

Penerimaan Negara Bukan Pajak telah mencapai Rp99,10 triliun (29,53 persen dari target), tumbuh 11,81 persen (*yoy*), Penerimaan Hibah sebesar Rp105,91 miliar, lebih rendah dari realisasi periode tahun 2021 sebesar Rp328,85 miliar.

Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp490,65 triliun atau sebesar 18,08 persen dari pagu APBN 2022, lebih rendah 6,19 persen (*yoy*) dari tahun sebelumnya, yang terdiri atas realisasi Belanja K/L sebesar Rp149,98 triliun (15,86 persen pagu APBN 2022) lebih rendah dari realisasi pada periode yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp201,63 triliun dan realisasi Belanja Non-K/L yang mencapai Rp164,20 triliun atau meningkat 10,61 persen (*yoy*).

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp176,46 triliun atau 22,93 persen dari pagu APBN 2022. Realisasi TKDD tersebut lebih tinggi Rp3,50 triliun atau 2,02 persen (*yoy*).

Ringkasan Eksekutif

Eskalasi risiko global berlanjut seiring normalisasi kebijakan moneter negara maju dan konflik geopolitik.

Kondisi tersebut memberikan *downside risk* terhadap prospek ekonomi global di 2022. Akibat langsung dari ketegangan geopolitik adalah meningkatnya harga komoditas global, terutama harga komoditas energi dan pangan. Selanjutnya, peningkatan harga komoditas global tersebut memberi tekanan

pada inflasi domestik di berbagai negara. Pada awalnya volatilitas pasar keuangan global juga mengalami kenaikan, namun mulai sedikit mereda yang tercermin dari pergerakan indeks saham di beberapa negara. Di sisi lain, stabilitas kondisi pasar keuangan domestik masih terjaga yang didukung oleh fundamental ekonomi yang kuat, terutama di sisi eksternal diikuti dengan tren pemulihan aktivitas ekonomi. Pemerintah akan tetap mewaspadai

perkembangan eskalasi risiko global saat ini terutama tekanan terhadap inflasi dan tetap akan memfokuskan penanganan Covid-19.

Hingga akhir Maret 2022, realisasi pendapatan negara dan hibah tercatat mencapai Rp500,99 triliun atau 27,14 persen terhadap target pada APBN 2022. Capaian tersebut lebih tinggi Rp122,17 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kinerja positif pendapatan negara masih terus berlanjut yang juga tercermin dari pertumbuhannya, dimana realisasi pendapatan negara dan hibah tumbuh 32,25 persen (yoy). Secara nominal, realisasi komponen pendapatan yang bersumber dari perpajakan mencapai Rp401,78 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp99,10 triliun, dan realisasi hibah mencapai Rp0,11 triliun. Berdasarkan pertumbuhannya, realisasi penerimaan perpajakan dan PNBP tumbuh berturut-turut sebesar 38,35 persen (yoy) dan 12,47 persen (yoy). Lebih lanjut, capaian masing-masing komponen pendapatan negara dari perpajakan dan PNBP terhadap target pada APBN 2022 berturut-turut 26,61 persen dan 29,53 persen.

Penerimaan perpajakan bersumber dari penerimaan pajak dan kepabeanan dan cukai, dimana realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp322,46 triliun atau telah mencapai 25,49 persen terhadap target pada APBN 2022. Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh 41,36 persen secara yoy. Secara nominal, capaian penerimaan pajak terutama berasal dari penerimaan pajak penghasilan (PPh) nonmigas serta pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM), dimana masing-masing kontribusinya terhadap total penerimaan pajak sebesar 53,37 persen dan 40,36 persen. Berdasarkan nominalnya, realisasi PPh nonmigas ditopang oleh capaian penerimaan dari subkomponen utamanya yaitu PPh 25/29 badan, PPh 21, dan PPh final. Jika dilihat dari pertumbuhannya, PPh nonmigas pertumbuhannya 42,56 persen (yoy) didukung oleh lima jenis pajak yang tumbuh tertinggi berturut-turut yaitu PPh 22 impor tumbuh 139,98 persen (yoy), PPh 25/29 badan tumbuh 135,94 persen (yoy), PPh 22 tumbuh 117,11 persen (yoy), PPh 26 tumbuh 25,17 persen (yoy), dan PPh 21 tumbuh 18,76 persen (yoy). Pertumbuhan subkomponen utama penerimaan PPh nonmigas menunjukkan terus berlanjutnya pemulihan

ekonomi di tahun 2022, yang terlihat juga dari indeks PMI (*Purchasing Manager Index*) yang masih berada pada level ekspansif. Kinerja PPh nonmigas juga didorong oleh faktor implementasi UU HPP dan program PPS (Program Pengungkapan Sukarela) di awal tahun 2022. Selain itu, kinerja positif PPh nonmigas juga didukung oleh kinerja penerimaan pajak secara sektoral, dimana sektor utama yang berkontribusi dominan terhadap penerimaan pajak masih terus melanjutkan tren pertumbuhannya yang positif. Sektor industri pengolahan dan perdagangan yang berkontribusi lebih dari 50 persen penerimaan pajak tumbuh signifikan, dimana kinerjanya didorong oleh peningkatan produksi, ekspor dan impor, serta konsumsi. Sektor lainnya yang mendorong kinerja penerimaan pajak yaitu jasa keuangan dan asuransi, sektor konstruksi dan real estate, serta sektor pertambangan yang tumbuh paling kuat oleh dorongan meningkatnya permintaan dan harga komoditas tambang. Lebih lanjut, capaian penerimaan pajak dari komponen penerimaan PPN/PPnBM secara nominal masih ditopang terutama oleh penerimaan PPN, khususnya PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan PPN Impor. Secara kumulatif PPN/PPnBM tumbuh

cukup signifikan sebesar 34,33 persen (*yoy*). Pertumbuhan komponen penerimaan PPN DN didorong oleh aktivitas ekonomi yang kembali normal dan konsumsi masyarakat yang meningkat. Selain itu, seiring konsumsi dalam negeri yang terus membaik, kegiatan impor masih meningkat meskipun melambat, sehingga kinerja PPN Impor masih tumbuh positif.

Realisasi penerimaan komponen perpajakan dari kepabeanan dan cukai capaiannya hingga akhir Maret 2022 sebesar Rp79,32 triliun atau telah mencapai 32,37 persen terhadap target pada APBN 2022. Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai tersebut tumbuh 27,34 persen (*yoy*). Secara nominal, penerimaan kepabeanan dan cukai terutama didukung oleh penerimaan dari cukai, khususnya cukai hasil tembakau (CHT) yang kontribusinya mencapai 70,16 persen dari total realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai.

Kinerja seluruh komponen penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat tumbuh positif dan signifikan yang terdiri dari penerimaan cukai, bea masuk (BM), dan bea Keluar (BK), dimana penerimaan cukai dan BM tumbuh masing-masing 15,64 persen (*yoy*), 39,24 persen (*yoy*).

Khusus untuk pertumbuhan komponen penerimaan dari BK, tercatat masih tumbuh sangat signifikan mencapai 132,22 persen (yoy). Capaian penerimaan kepabeanan dan cukai tersebut didorong terutama oleh kinerja CHT yang konsisten tumbuh melanjutkan tren di tahun 2021, serta didukung juga oleh kinerja perpajakan internasional seiring dengan tren kenaikan harga komoditas dan aktivitas ekspor-impor sejak awal tahun 2022 yang masih tumbuh positif. Faktor yang mendorong kinerja penerimaan CHT yaitu dampak penyesuaian kebijakan tarif cukai rokok dan limpahan pelunasan cukai rokok tahun 2021. Lebih lanjut, pertumbuhan komponen penerimaan pajak perdagangan internasional yang berasal dari BM kinerjanya didorong oleh kinerja impor nasional seiring meningkatnya konsumsi dan semakin membaiknya pemulihan ekonomi. Penerimaan komponen BK mengalami peningkatan kinerja yang sangat signifikan didorong oleh tumbuhnya volume ekspor terutama komoditas minerba tembaga serta produk *Crude Palm Oil* (CPO) dan turunannya. Pertumbuhan BK juga dipengaruhi oleh membaiknya permintaan global yang mendorong peningkatan harga komoditas andalan Indonesia yang dikenai tarif BK lebih

tinggi. Selain itu, kinerja BK juga didukung oleh kinerja ekspor dari sektor industri pengolahan, pertambangan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi, serta sektor transportasi dan pergudangan yang positif pertumbuhannya.

Realisasi PNBP sampai dengan akhir Maret 2022 mencapai Rp99,10 triliun (29,53 persen dari pagu APBN 2022), atau tumbuh positif 11,81 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy).

Peningkatan capaian realisasi tersebut utamanya bersumber dari realisasi PNBP Sumber Daya Alam (SDA) dan PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan (KND).

Secara lebih rinci, realisasi PNBP SDA mencapai Rp47,64 triliun atau tumbuh positif sebesar 97,48 persen (yoy). Tumbuh positifnya PNBP SDA tersebut didorong oleh kenaikan ICP dan harga komoditas minerba, terutama batubara. Di sisi lain, PNBP yang berasal dari KND juga mengikuti tren positif dari PNBP SDA dengan capaian sebesar Rp142,71 miliar, PNBP KND tumbuh signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan PNBP Lainnya mencapai Rp33,90 triliun atau tumbuh negatif sebesar 16,44 persen (yoy)

jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan PNBP Lainnya antara lain disebabkan oleh turunnya pendapatan penempatan uang negara pada bank umum dan bank Indonesia, pendapatan premium obligasi negara, pendapatan kembali belanja TAYL (Tahun Anggaran Yang Lalu), pendapatan penggunaan spektrum frekuensi radio dan hak penyelenggaraan telekomunikasi, pendapatan jasa transportasi dan pendapatan jasa Kantor Urusan Agama (KUA). Sementara itu, pendapatan BLU juga mengalami pertumbuhan negatif seperti PNBP Lainnya, dengan realisasi sebesar Rp17,43 triliun atau tumbuh negatif sebesar 27,23 persen (yoy). Pertumbuhan negatif pada pendapatan BLU disebabkan oleh penurunan pendapatan dana perkebunan kelapa sawit, dan pendapatan layanan pendidikan.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Maret 2022 mencapai Rp490,65 triliun (18,1 persen dari pagu APBN 2022), lebih rendah 6,19 persen (yoy) dari tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp314,18 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp176,46 triliun. Realisasi

Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan 31 Maret 2022 berkontraksi sebesar 10,3 persen (yoy). Lebih rendahnya realisasi Belanja Pemerintah Pusat periode Maret 2022 terutama terjadi pada Belanja Modal dan Belanja Barang yang berkontraksi sebesar 45,3 persen dan 33,1 persen (yoy). Penurunan Belanja Modal dikarenakan pada tahun 2021 terdapat realisasi pembayaran atas pekerjaan fisik yang selesai pada tahun 2020. Sementara, lebih rendahnya realisasi Belanja Barang dibandingkan dengan tahun 2021 dikarenakan kebutuhan vaksin pada awal 2022 sudah tercukupi dan penambahan pasien Covid-19 yang terkendali. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kinerja penyerapan pada bulan-bulan berikutnya melalui penyaluran bansos dan pelaksanaan berbagai program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Realisasi belanja subsidi sampai dengan Maret 2022 mencapai Rp38,51 triliun (18,61 persen dari pagu APBN 2022), atau meningkat 80,10 persen secara yoy. Realisasi belanja subsidi tersebut meliputi subsidi energi sebesar Rp32,52 triliun yang jika dibandingkan dengan tahun lalu hanya terealisasi sebesar Rp20,86 triliun atau

tumbuh 55,91 persen (yoy). Sementara itu, realisasi subsidi nonenergi sebesar Rp5,99 triliun sedangkan periode yang sama pada tahun lalu hanya terealisasi sebesar Rp0,53 triliun atau tumbuh 1.037,65 persen (yoy). **Realisasi belanja subsidi energi mencapai 24,26 persen dari pagu APBN 2022 yang utamanya bersumber dari subsidi BBM dan subsidi LPG Tabung 3 Kg yang mencapai Rp24,90 triliun (32,10 persen dari pagu), atau mengalami peningkatan 117,01 persen (yoy).** Realisasi subsidi BBM dan subsidi LPG 3 Kg tersebut merupakan pembayaran untuk subsidi pada tahun berjalan sebesar Rp14,72 triliun, yang meningkat 60,08 persen secara yoy, dan pembayaran atas kurang bayar tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp10,17 triliun. Peningkatan realisasi subsidi BBM dan subsidi LPG Tabung 3 Kg utamanya dipengaruhi kenaikan ICP yang rata-rata naik sebesar 66,70 persen (yoy) selama periode Januari-Maret 2022 dan kenaikan volume LPG sebesar 4,24 persen (yoy) selama Januari-Februari 2022. **Sementara itu, realisasi subsidi listrik mencapai Rp7,62 triliun atau 13,50 persen dari pagu.** Jika dibandingkan dengan tahun

lalu, realisasi subsidi listrik lebih rendah sebesar 18,78 persen.

Sementara itu, realisasi belanja subsidi nonenergi pada Januari-Maret 2022 sebesar Rp5,99 triliun, atau 8,22 persen dari pagu APBN 2022. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi subsidi kredit program sebesar Rp4,42 triliun, dan subsidi pupuk sebesar Rp1,58 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021, realisasi subsidi nonenergi mengalami peningkatan sangat signifikan sebesar 1.037,65 persen. Hal ini antara lain didorong oleh pertumbuhan realisasi subsidi kredit program yang sangat signifikan dari periode Januari-Maret tahun lalu yang hanya sebesar Rp381,84 miliar menjadi sebesar Rp4,42 triliun pada periode yang sama tahun ini atau tumbuh sebesar 1.056,38 persen. Sementara itu, realisasi subsidi pupuk juga tercatat turut memengaruhi yaitu dengan adanya realisasi pada periode Januari-Maret 2022 yang tercatat sebesar Rp1,58 triliun dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang belum terdapat realisasi. Selain itu, jika dilihat dari sisi penyaluran volume

pupuk bersubsidi juga terjadi peningkatan sebesar 13,23 persen atau telah disalurkan sebanyak 2,19 juta ton pada Januari-Maret 2022 sedangkan pada periode yang sama tahun lalu hanya disalurkan sebanyak 1,93 juta ton. Adapun realisasi volume pupuk organik cair tercatat hingga Maret 2022 adalah sebanyak 38,30 ribu liter sedangkan pada tahun lalu di periode yang sama belum terdapat penyaluran karena pupuk organik cair baru disalurkan sejak Mei 2021. Selanjutnya, jenis subsidi non-energi lainnya masih belum terdapat realisasi disebabkan oleh adanya proses administrasi dan verifikasi dalam penyaluran subsidi.

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan 31 Maret 2022 mencapai Rp176,46 triliun atau 22,93 persen dari pagu Perpres 104/2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022. Realisasi TKDD tersebut tumbuh 2,02 persen (yoy) atau lebih tinggi Rp3,50 triliun dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp172,96 triliun. Realisasi TKDD bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp165,68 triliun (23,61 persen dari pagu APBN 2022) dan Dana Desa Rp10,78 triliun

(15,85 persen dari pagu APBN 2022).

Realisasi TKD sampai dengan Maret 2022 lebih tinggi Rp3,28 triliun atau tumbuh 2,02 persen dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2021. Secara lebih rinci, realisasi TKD terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp12,61 triliun (11,98 persen pagu), Dana Alokasi Umum (DAU) Rp121,04 triliun (32,02 persen pagu), Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Rp31,43 triliun (24,42 persen pagu), DAK Fisik Rp92,78 miliar (0,15 persen pagu), Dana Insentif Daerah (DID) Rp304,40 miliar (4,35 persen pagu), dan Dana Keistimewaan DIY Rp198,00 miliar (0,91 persen pagu). Dana Otonomi Khusus menjadi satu-satunya jenis TKD yang belum ada realisasi.

Kinerja realisasi TKD didorong oleh beberapa faktor, yaitu: (i) Realisasi DAU lebih tinggi Rp17,02 triliun (16,36 persen) dipicu oleh peningkatan kepatuhan pemerintah daerah (pemda) dalam menyampaikan syarat salur; (ii) Realisasi DAK Nonfisik lebih tinggi Rp3,48 triliun (tumbuh 12,44 persen) seiring meningkatnya kinerja penyampaian laporan sekolah ke Kemendikbud sebagai

syarat salur Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan (iii) Realisasi DID lebih tinggi Rp181,0 miliar (tumbuh signifikan 146,68 persen) sejalan dengan peningkatan kepatuhan pemda dalam memenuhi syarat salur DID tahap I.

Adapun realisasi DBH sampai dengan Maret 2022 lebih rendah Rp17,42 triliun atau terkontraksi 58,00 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama di tahun 2021. Hal tersebut terjadi karena *high-based effect* pada tahun 2021 dimana terdapat percepatan penyaluran Kurang Bayar DBH pada bulan Februari tahun 2021 sebesar Rp9,5 triliun.

Sementara itu, realisasi Dana Desa sampai dengan Maret 2022 lebih tinggi Rp223,90 miliar atau tumbuh 2,12 persen dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama di tahun 2021. Lebih tingginya realisasi Dana Desa tersebut didorong oleh meningkatnya kepatuhan pemerintah desa dalam memenuhi syarat salur Dana Desa dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

Defisit fiskal pada APBN 2022 ditargetkan 4,85 persen terhadap PDB, lebih rendah dari target tahun 2020 dan 2021.

Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk mencapai *soft landing* kebijakan fiskal. Diharapkan pada tahun 2023 defisit fiskal Indonesia dapat kembali di bawah 3 persen terhadap PDB. Kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut ditargetkan sebesar Rp868,02 triliun, terutama dipenuhi melalui pembiayaan utang sebesar Rp973,58 triliun sesuai pagu APBN 2022. Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Negara, terdapat surplus anggaran pada akhir Maret 2022 sebesar Rp10,34 triliun atau sekitar 0,06 persen dari PDB. Sementara itu realisasi Pembiayaan Anggaran hingga akhir Maret 2022 ini sudah mencapai Rp139,38 triliun. Realisasi Pembiayaan Utang sampai akhir Maret 2022 tercapai sebesar Rp149,59 triliun (15,4 persen dari Pagu APBN 2022). Realisasi Pembiayaan Utang tersebut terdiri atas realisasi Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp133,61 triliun dan

realisasi Pinjaman (Neto) sebesar Rp15,99 triliun yang berasal dari Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp16,27 triliun. Hingga Akhir Maret 2022, Pemerintah melakukan pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar negatif Rp470,10 miliar dan menarik Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) sebesar Rp190,80 miliar. Disisi lain, Pemerintah melakukan penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) sebesar Rp35,37 triliun namun Pemerintah juga melakukan pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri sebesar negatif Rp19,10 triliun. Di samping Pembiayaan Utang, Pemerintah juga telah merealisasikan Pembiayaan Investasi sebesar negatif Rp11,92 triliun dari Investasi kepada BLU sebesar negatif Rp12,00 triliun, Penerimaan Kembali Investasi sebesar Rp79,60 miliar, Pemberian Pinjaman sebesar Rp1,62 triliun dan Pembiayaan Lainnya sebesar Rp85,00 miliar hingga akhir Maret 2022.



Postur APBN

Realisasi APBN sampai dengan 31 Maret 2022 mencatatkan surplus sebesar 0,06 persen terhadap PDB (sampai dengan 31 Maret 2021 APBN defisit sebesar 0,85 persen terhadap PDB). Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp500,99 triliun atau meningkat 32,06 persen (yoy). Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp490,65 triliun atau 18,08 persen terhadap pagu APBN 2022.

Realisasi Pendapatan Negara tersebut terdiri atas:

- Realisasi Penerimaan Perpajakan yang telah mencapai Rp401,78 triliun (26,61 persen dari pagu APBN 2022 dan tumbuh 38,35 persen (yoy), dengan rincian Penerimaan Pajak sebesar

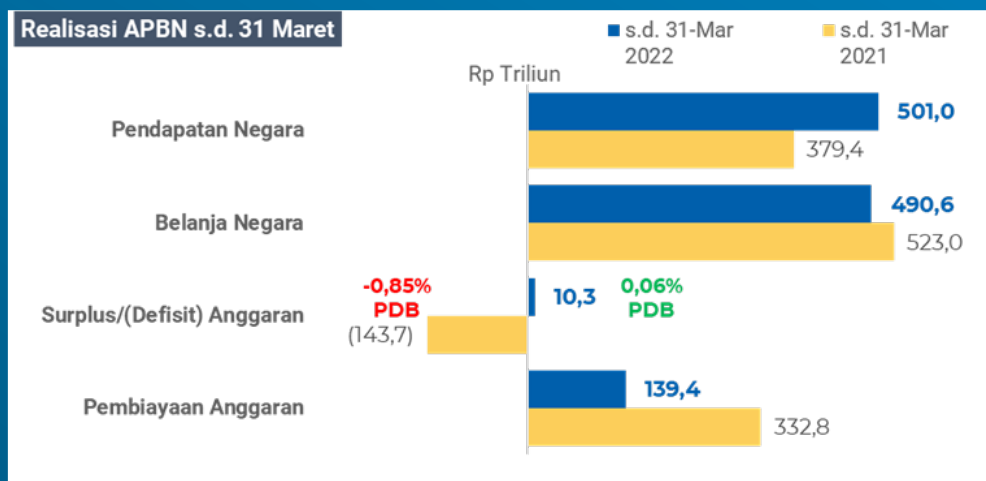
Rp322,46 triliun (25,49 persen target atau tumbuh 41,36 persen (yoy)) dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp79,32 triliun (32,37 persen target atau tumbuh 27,34 persen (yoy)).

- PNBPN sampai dengan 31 Maret 2022 mencatatkan realisasi sebesar Rp99,10 triliun (29,53 persen target atau tumbuh 11,81 persen (yoy)).

- Penerimaan Hibah sampai dengan 31 Maret 2022 telah terealisasi sebesar Rp105,91 miliar, lebih rendah dari realisasi periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp328,85 miliar.

Belanja Negara yang telah terealisasi sebesar 18,08 persen dari pagu APBN 2022, terdiri atas:

Realisasi APBN s.d 31 Maret 2022



Realisasi APBN s.d 31 Maret 2022

APBN (triliun rupiah)	2021				2022			
	APBN	Realisasi s.d. 31-Mar	% thd APBN	Growth (%)	APBN	Realisasi s.d. 31-Mar	% thd APBN	Growth (%)
A. Pendapatan Negara	1.743,65	379,37	21,76	74,34	1.846,14	500,99	27,14	32,06
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.742,75	379,04	21,75	74,33	1.845,56	500,88	27,14	32,14
1. Penerimaan Perpajakan	1.444,54	290,41	20,10	62,57	1.510,00	401,78	26,61	38,35
a. Pajak	1.229,58	228,12	18,55	48,54	1.265,00	322,46	25,49	41,36
b. Kepabeanan dan Cukai	214,96	62,29	28,98	148,51	245,00	79,32	32,37	27,34
2. PNBPNP	298,20	88,64	29,72	128,51	335,56	99,10	29,53	11,81
II. Penerimaan Hibah	0,90	0,33	36,43	81,13	0,58	0,11	18,26	(67,79)
B. Belanja Negara	2.750,03	523,04	19,02	87,19	2.714,16	490,65	18,08	(6,19)
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.954,55	350,08	17,91	116,45	1.944,54	314,18	16,16	(10,25)
1. Belanja K/L	1.031,96	201,63	19,54	140,63	945,75	149,98	15,86	(25,62)
2. Belanja Non K/L	922,59	148,45	16,09	90,46	998,79	164,20	16,44	10,61
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	795,48	172,96	21,74	46,98	769,61	176,46	22,93	2,02
1. Transfer Ke Daerah	723,48	162,41	22,45	39,98	701,61	165,68	23,61	2,02
2. Dana Desa	72,00	10,56	14,66	535,91	68,00	10,78	15,85	2,12
C. Keseimbangan Primer	(633,12)	(65,28)	10,31	(137,26)	(462,15)	94,71	(20,49)	245,07
D. Surplus/(Defisit) Anggaran	(1.006,38)	(143,67)	14,28	(132,45)	(868,02)	10,34	(1,19)	107,20
% Surplus/(Defisit) thd PDB	(5,70)	(0,85)			(4,85)	0,06		
E. Pembiayaan Anggaran	1.006,38	332,83	33,07	193,11	868,02	139,38	16,06	(58,12)
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan Anggaran	-	189,16			-	149,72		

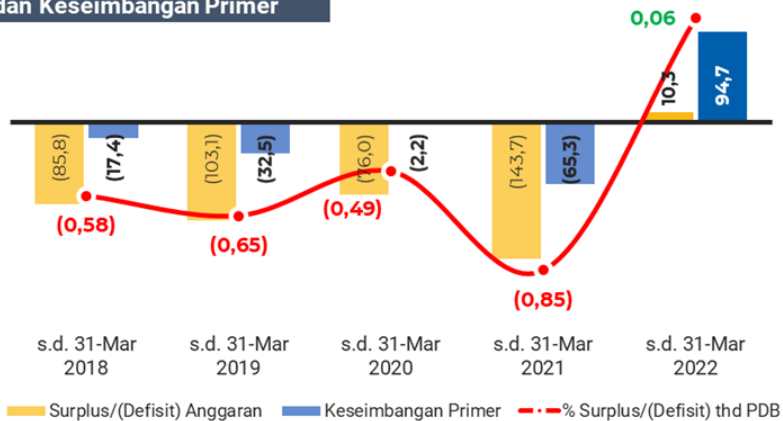
dalam Triliun Rupiah

- Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp314,18 triliun atau 16,16 persen pagu APBN 2022, lebih rendah dari realisasi periode yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp350,08 triliun. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut terdiri atas realisasi Belanja K/L sebesar Rp149,98 triliun (15,86 persen pagu APBN 2022) lebih rendah dari realisasi pada periode yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp201,63 triliun dan realisasi Belanja Non-K/L yang mencapai Rp164,20 triliun atau meningkat 10,61 persen (yoy).
- Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp176,46 triliun (22,93 persen dari alokasi APBN 2022), meningkat

2,02 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp172,96 triliun.

Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan belanja negara tersebut, APBN tahun 2022 sampai dengan 31 Maret 2022 mengalami surplus sebesar Rp10,34 triliun (0,06 persen terhadap PDB) dan keseimbangan primer juga mengalami surplus sebesar Rp94,71 triliun. Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran sebesar Rp139,38 triliun, sehingga sampai dengan 31 Maret 2022 terdapat kelebihan pembiayaan anggaran sebesar Rp149,72 triliun.

Perkembangan Surplus/Defisit dan Keseimbangan Primer





Perkembangan Ekonomi Makro

Perkembangan kasus Covid-19 nasional cukup terkendali yang mendorong pemerintah untuk melakukan kebijakan relaksasi aktivitas masyarakat di beberapa daerah. Prospek ekonomi nasional di kuartal I tahun 2022 sangat positif yang terutama didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat yang signifikan. Selain itu, beberapa leading indikator konsumsi dan produksi terus memberikan gambaran positif

perkembangan ekonomi nasional di kuartal I 2022. Dari sisi konsumsi, belanja masyarakat tetap di atas level pandemi yang diperlihatkan dengan indikator Mandiri *Spending Index* (MSI) yang kembali meningkat di Maret 2022. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga masih tetap di atas level optimis, serta Indeks Penjualan Ritel yang terus meningkat. Dari sisi produksi, PMI manufaktur Indonesia terus berada dalam level ekspansi dalam

tujuh bulan terakhir. Kondisi Covid-19 yang terus membaik dan perbaikan permintaan masyarakat diyakini akan mendorong aktivitas produksi dan penjualan.

Stabilitas pasar keuangan domestik tetap terjaga ditengah volatilitas keuangan global yang masih berlangsung dampak dari eskalasi risiko global. Pasar saham domestik mencatatkan terus mengalami peningkatan dan IHSG tercatat sebesar 7.227 per 20 April 2022. Sementara itu, stabilitas nilai tukar Rupiah juga masih terjaga tercatat sebesar Rp14.347 per USD pada 19 April 2022. Nilai tukar Rupiah yang mengacu pada JISDOR ini mengalami depresiasi relatif kecil sebesar 0,54 persen dibandingkan awal tahun 2022. Rata-rata nilai tukar Rupiah hingga 19 April 2022 adalah sebesar Rp14.346 per USD. Disisi lain, inflasi sedikit mengalami tekanan terutama didorong peningkatan *demand* dan kenaikan harga pangan global serta faktor cuaca. Inflasi pada bulan Maret tercatat sebesar 2,64 persen (*yoy*) atau 1,19 persen (*ytd*). Ke depan, Pemerintah tetap terus berupaya untuk menjaga stabilitas harga dengan

memastikan ketersediaan pasokan hingga ke daerah. Posisi cadangan devisa Indonesia per akhir Maret 2022 sedikit menurun menjadi sebesar USD139,1 miliar, dibandingkan dengan per akhir Februari 2022 sebesar USD141,4 miliar. Posisi cadangan devisa ini masih mampu untuk mendukung ketahanan nasional dari gejala eksternal.

Seiring dengan penurunan kasus Covid-19 di awal tahun 2022 telah mendorong peningkatan mobilitas dan turut menggerakkan sektor pariwisata dan sektor pendukung terkait, seperti restoran, hotel, dan transportasi. Kunjungan wisatawan mancanegara (*wisman*) ke Indonesia pada Februari 2022 mencapai 18,46 ribu kunjungan, meningkat 151,98 persen dibandingkan dengan kunjungan Februari 2021. Demikian pula, jumlah kunjungan *wisman* tersebut juga meningkat sebesar 21,91 persen dibandingkan Januari 2022. Secara kumulatif, hingga Februari 2022, jumlah kunjungan *wisman* ke Indonesia melalui pintu masuk utama mencapai 33,59 ribu kunjungan, meningkat 2,5 kali lipat dibandingkan kunjungan

wisman periode yang sama di 2021. Sementara itu, aktivitas industri perhotelan memperlihatkan peningkatan dibandingkan kondisi tahun lalu. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Indonesia mencapai 38,54 persen pada Februari 2022 meningkat 6,14 poin dibandingkan kondisi Februari 2021. Namun, TPK bulan Februari 2022 menurun sebesar 3,89 poin dibandingkan Januari 2021.

Dorong Laju Ekspor Nasional, Bea Cukai Tambah Deretan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat

Bea Cukai terus berupaya menjamin kelancaran kegiatan ekspor nasional melalui kebijakan yang mendukung pelaku usaha, termasuk dengan menggelontorkan berbagai program fasilitas untuk memudahkan terlaksananya ekspor.

Salah satu fasilitas yang diberikan Bea Cukai ialah kawasan berikat, yaitu tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor

atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai. Dengan memanfaatkan fasilitas ini, para pelaku usaha akan memperoleh fasilitas fiskal dan non fiskal, antara lain penangguhan pembayaran bea masuk, tidak dipungut pajak impor, dan percepatan pengeluaran barang impor dari pelabuhan.

Kemudahan perolehan fasilitas tersebut pun dijamin



Bea Cukai, seperti tercermin dari pemberian izin fasilitas kawasan berikat kepada dua perusahaan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY (Jateng dan DIY) di bulan April 2022. Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Jateng dan DIY, Amin Tri Sobri menyampaikan bahwa Bea Cukai akan terus meningkatkan fungsi fasilitasi kepada industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya berdampak secara nasional.

“Pemberian izin fasilitas kawasan berikat merupakan salah satu upaya pemerintah melalui Bea Cukai untuk meningkatkan investasi dan ekspor. Hal ini akan memberikan dampak ekonomi seperti penyerapan tenaga

kerja dan terciptanya simpul ekonomi baru yang menjadi penggerak ekonomi sektor riil,” katanya.

Berkolaborasi dengan Bea Cukai Semarang, Kanwil Bea Cukai Jateng DIY memberikan perizinan fasilitas kawasan berikat kepada PT Indesso Aroma Ungaran pada tanggal 01 April 2022. Perusahaan tersebut bergerak di bidang industri kimia dasar organik dengan hasil produksi berupa vanili. Hingga saat ini, perusahaan telah memiliki seratus orang tenaga kerja dan nilai investasi sekitar Rp210 miliar.

Kemudian di tanggal 7 April 2022, Kanwil Bea Cukai Jateng DIY juga berkolaborasi dengan Bea Cukai Surakarta memberikan izin fasilitas

kawasan berikat kepada PT Sinar Klaten Makmur yang bergerak di bidang industri pakaian jadi dari tekstil dengan hasil produksi berupa *underwear, outwear, dan medicalwear*. Di tahun 2022 perusahaan diperkirakan mampu menyerap 800 orang tenaga kerja dan dengan nilai investasi sekitar Rp23 miliar.

“Kami berharap kedua perusahaan dapat memanfaatkan fasilitas tersebut seoptimal mungkin termasuk pemanfaatan CCTV dan *IT Inventory* yang baik. Sehingga tujuan pemberian fasilitas yaitu, untuk menggairahkan pertumbuhan ekonomi nasional dan perekonomian daerah sekitar perusahaan dapat tercapai,” ujar Amin.

Dukungan Bea Cukai dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Kawasan Industri Hasil Tembakau

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya kita sebut Bea Cukai memiliki peran sebagai *trade facilitator* dan *industrial*

assistance yaitu memfasilitasi perdagangan dan industri dalam negeri, *community protector* yaitu sebagai pelindung masyarakat dari barang-barang ilegal dan berbahaya, serta *revenue collector* yaitu sebagai pemungut penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.

Dalam mendukung, mengembangkan, dan meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah pada sektor hasil tembakau, Bea Cukai memberikan kemudahan berusaha dengan membentuk Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT). KIHT merupakan kawasan tempat



pemuatan kegiatan industri hasil tembakau yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, serta fasilitas penunjang yang disediakan, dikembangkan, dan dikelola oleh pengusaha KIHT. Sedangkan kemudahan yang diberikan Bea Cukai berupa perizinan berusaha, kegiatan berusaha, dan penundaan pembayaran cukai.

Selain memberikan kemudahan berusaha, pembentukan KIHT bertujuan sebagai sarana peningkatan kepatuhan ketentuan di bidang cukai melalui metode pembinaan langsung kepada pengguna jasa di lokasi KIHT dan salah satu cara pengawasan yang bersifat nonrepresif untuk mengurangi peredaran hasil tembakau ilegal. Pembentukan KIHT juga sebagai optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) dalam menumbuhkan

perekonomian di daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK), saat ini telah ditetapkan dua KIHT sesuai nomor KM-12/WBC.17/2020 tanggal 7 Juli 2020 yang berlokasi di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, dan nomor 164/WBC.10/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang berlokasi di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Selain itu, terdapat beberapa daerah yang saat ini telah memulai proses pembentukan KIHT, yaitu di daerah Cilacap, Garut, Madura, Malang, Mataram, dan Probolinggo.

Tercatat dalam data yang diperoleh Bea Cukai, selama KIHT Soppeng resmi dijalankan telah memberikan penerimaan negara sebesar Rp1,101 miliar. Hal ini memberi kontribusi

positif untuk penerimaan Bea Cukai Parepare selaku kantor pengawas. “Selain berkontribusi positif terhadap penerimaan, KIHT Soppeng juga memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Ini menandakan bahwa berdirinya KIHT Soppeng memberikan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap kondisi perekonomian di sekitar KIHT Soppeng,” ungkap Hatta Wardhana, Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai.

Sesuai yang tercantum dalam pasal 66A ayat (1) Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2007, dinyatakan bahwa penerimaan negara dari CHT yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil CHT sebesar 2 persen, salah satunya digunakan untuk mendanai pembinaan industri. Pembinaan industri yang dimaksud salah satunya untuk mendukung bidang penegakan hukum meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan Kawasan Industri Hasil Tembakau.

Berdasarkan data laporan penerimaan Bea Cukai pada tahun 2021, capaian cukai mencapai Rp195,52 triliun atau 108,62 persen dari target APBN. Capaian ini tumbuh sebesar 10,91 persen *yoy (year on year)* atau setara Rp19,21 triliun dibandingkan

penerimaan pada tahun 2020. Angka pertumbuhan yang positif menghasilkan alokasi DBH CHT yang dapat dimanfaatkan dalam program pembinaan KIHT. Untuk itu, Bea Cukai harus memastikan bahwa penggunaan DBH CHT telah tepat sasaran agar dapat dimanfaatkan oleh pengusaha dalam industri hasil tembakau.

“Untuk meningkatkan penerimaan hasil produksi, pengusaha harus memikirkan peningkatan dari sisi kualitas dan kuantitas bahan baku sehingga menghasilkan produk hasil tembakau yang berdaya saing tinggi. Pengusaha juga harus memikirkan pemasaran produk yang efektif dan pandai melihat pangsa pasar. Dalam segi pengawasan, Bea Cukai juga melakukan pemberantasan rokok ilegal untuk menciptakan iklim usaha yang positif,” tutur Hatta.

Hatta juga mengungkapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah setempat dan masyarakat yang sudah bekerja sama dengan Bea Cukai dalam pengelolaan DBH CHT dan kepatuhan peraturan di bidang cukai dalam pelaksanaan kegiatan KIHT sehingga ekonomi di daerah dapat tumbuh positif. Upaya pembinaan KIHT yang berasal dari DBH CHT dilakukan Bea Cukai karena sejalan dengan program pemerintah dalam Peningkatan Ekonomi Nasional (PEN). Seiring dengan pertumbuhan ekonomi di tingkat regional di KIHT, perekonomian negara secara nasional juga ikut tumbuh karena adanya penerimaan negara.

Fasilitas Industri Migas dan Panas Bumi, Bea Cukai Topang Ketahanan Energi Nasional

Fasilitas Industri Migas dan Panas Bumi, Bea Cukai Topang Ketahanan Energi Nasional

Hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari peran energi. Pekerjaan, hiburan, bahkan proses belajar saat ini sangat bergantung dari hal ini. Dalam lingkup luas energi juga berperan penting dalam pembangunan nasional, yang mencakup aspek-aspek sosial, ekonomi, dan pendorong

utama berkembangnya sektor industri. Untuk memenuhi kebutuhan energi yang tinggi, pemerintah berupaya memberikan fasilitas yang mendukung usaha sektor minyak dan gas (Migas) sebagai salah satu sumber energi utama, serta fasilitas terhadap perusahaan panas bumi sebagai Energi Baru Terbarukan (EBT). Dalam hal ini, apa peran Bea Cukai dalam mendukung pemerintah?

Industri hulu migas merupakan salah satu sektor industri



yang sangat krusial dalam menopang perekonomian negara, karena menjadi salah satu sumber utama Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) yang mendukung realisasi APBN 2021. Hingga 31 Januari 2022, kontribusi pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) terutama dari sektor migas tumbuh secara signifikan dengan realisasi pendapatan sebesar Rp8,76 triliun atau tumbuh sebesar 139,23 persen jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di lain sisi, panas bumi menjadi energi alternatif yang saat ini menjadi perhatian pemerintah, mengingat potensi besarnya sebagai pemasok kebutuhan EBT yang dapat dimanfaatkan untuk menopang kemandirian energi nasional, serta menjadi sumber alternatif energi

yang ramah lingkungan. Hal ini sangat berpotensi untuk diwujudkan, mengingat Indonesia memiliki sumber daya panas bumi yang berlimpah, dengan jajaran gunung berapi yang terkenal dengan istilah *Ring of Fire*. Namun perlu kita ketahui, saat ini pemanfaatan energi ini baru 7 persen dari potensi yang ada.

Bea Cukai sebagai *government agency* yang memiliki tugas menjadi trade facilitator dan industrial assistance berupaya membantu dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan produksi migas dan panas bumi. Hal ini diwujudkan melalui pemberian fasilitas fiskal atas kegiatan usaha hulu migas yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 217 Tahun 2019, dan fasilitas fiskal atas kegiatan

pengusahaan panas bumi yang dituangkan dalam PMK nomor 218 Tahun 2019 yang telah berlaku sejak Maret 2020.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan bahwa terhadap kegiatan hulu migas dan pengusahaan panas bumi akan mendapatkan fasilitas seperti pembebasan bea masuk, termasuk bea masuk anti dumping, imbalan, dan pengamanan, serta tidak dipungutnya pajak dalam rangka impor berupa PPN, atau PPN dan PPnBM, dan/atau PPh Pasal 22. "Untuk detailnya tertuang dalam PMK 217 dan 218 Tahun 2019," imbuhnya.

Sepanjang tahun 2021, terdapat total 1623 pengajuan permohonan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Atas permohonan tersebut kami berhasil memberikan fasilitas fiskal kepada usaha sektor migas dan pengusahaan panas bumi dengan total nilai impor sebesar USD 1,6 miliar. "Total pembebasan bea masuk sebesar Rp369.352.760.606 untuk sektor migas, dan sebesar Rp29.780.610.001 untuk sektor pengusahaan panas bumi," terang Nirwala.

Mendukung fasilitas fiskal tersebut, Bea Cukai turut memberikan berbagai inovasi dalam percepatan

pelayanan. Di antaranya dengan melakukan pelimpahan wewenang pemberian fasilitas kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai yang mengawasi wilayah kerja, pengajuan permohonan fasilitas pembebasan dilakukan secara elektronik melalui Sistem INSW (SINSW), serta pengembangan aplikasi Sistem Otomasi Fasilitas Kepabeanan (SOFast) yang mampu mempersingkat janji layanan penerbitan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) fasilitas dari semula lima hari kerja menjadi lima jam kerja.

Nirwala menjelaskan bahwa SOFast merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Fasilitas Kepabeanan Bea Cukai bekerja sama dengan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (IKC) untuk mempermudah proses penerbitan KMK fasilitas hulu migas oleh Kanwil atau KPU Bea Cukai. SOFast secara otomatis menarik data permohonan dari sistem INSW dan melakukan penggabungan KMK fasilitas. Selanjutnya akan disetujui oleh Kepala Kanwil atau KPU Bea Cukai secara elektronik, dan diberikan penomoran secara otomatis. KMK kemudian dikirim secara elektronik ke sistem INSW untuk dapat diakses oleh KKKS.

Pemberian fasilitas ini dapat dianggap sebagai investasi yang dilakukan pemerintah Indonesia. Dengan harapan akan memperoleh *return on investment* (RoI) atau keuntungan, berupa peningkatan jumlah investor di bidang industri hulu migas dan panas bumi, sehingga dapat menunjang ketahanan energi nasional, meningkatnya ekspor minyak dan gas bumi untuk menunjang devisa nasional, serta meningkatnya penerimaan negara. "Apresiasi Pun patut diberikan kepada para *stakeholders* atas dorongan dan upaya investasi usaha di sektor migas dan panas bumi di Indonesia melalui kepatuhan di bidang kepabeanaan selama ini," ujar Nirwala.

Di samping itu, adanya fasilitas ini akan menambah pembangunan infrastruktur pada wilayah kerja pertambangan, seperti jalan dan pelabuhan, meningkatkan pembayaran pajak daerah untuk menunjang penerimaan APBD melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah kerja pertambangan melalui *program Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh KKKS.

"Industri migas dan panas bumi merupakan industri padat modal (*high cost*), padat teknologi (*high technology*), dan padat risiko (*high risk*). Namun, pemerintah melalui Bea Cukai senantiasa melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik serta kemudahan-kemudahan bagi para pelaku usaha di bidang industri ini. Semoga dapat bermanfaat dalam menunjang ketahanan energi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," tutup Nirwala.

Ketahui yang Dapat Dilakukan Jika Temukan Indikasi Penipuan Bermodus Belanja *Online*

Di tengah pesatnya perkembangan aktivitas di dunia maya dan kemudahan transaksi *online* saat ini, masyarakat harus tetap mewaspadaai *detrimental effect* atau efek yang merugikan, termasuk risiko penipuan saat berbelanja *online*. Terlebih, modus penipuan belanja online kerap dilancarkan dengan mengatasnamakan instansi pemerintah seperti Bea Cukai untuk lebih meyakinkan calon korbannya.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Hatta Wardhana mengatakan dari *data contact center* Bea Cukai yang dirilis Maret 2022, modus belanja online menjadi modus yang paling sering digunakan oleh pelaku penipuan mengatasnamakan Bea Cukai. Sepanjang bulan Februari 2022, tercatat 271 kasus penipuan yang dilaporkan atau mengalami peningkatan 82 persen apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencatatkan 149 kasus penipuan.

“Kami terus berupaya mengimbau masyarakat untuk berhati-hati ketika berbelanja *online*. Masyarakat harus waspada dengan *online shop* yang menjual barang dengan harga di bawah pasaran, karena setelah transaksi, biasanya pelaku akan berkelit meminta uang tambahan dengan alasan barang ditahan Bea Cukai. Tak hanya itu, calon korban pun umumnya diancam oleh penipu yang mengaku petugas Bea Cukai untuk segera mentransfer sejumlah uang ke rekening pribadi. Ini sudah jelas merupakan penipuan, apalagi jika barang tersebut diperjualbelikan di dalam negeri. Bea Cukai tidak memeriksa pengiriman barang antarpulau di dalam negeri, kecuali dari wilayah *free trade zone*,” tegas Hatta.

Menurutnya, modus penipuan seperti itu dapat diminimalisasi dengan berbelanja di situs *e-commerce* atau *online shop* terdaftar yang penjualnya sudah terverifikasi. Lalu, masyarakat pun diharapkan memahami aturan kepabeanan atas barang kiriman sehingga tidak mudah dikelabui oleh penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai.

“Jika mendapat informasi barang yang Anda beli dari luar negeri tertahan di Bea Cukai, segera periksa status barang kiriman pada [www.beacukai](http://www.beacukai.go.id/barangkiriman)

[go.id/barangkiriman](http://www.beacukai.go.id/barangkiriman). Apabila penjual tak dapat menunjukkan nomor resi, sehingga barang tak bisa dilacak, bisa dipastikan ini adalah modus penipuan,” ujar Hatta.

Bea Cukai, menurut Hatta, tidak pernah menghubungi pemilik barang untuk penagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang kiriman. Juga tidak pernah meminta kiriman uang untuk pembayaran tersebut ke nomor rekening pribadi, karena pembayaran untuk penerimaan negara dilakukan menggunakan kode billing.

Hatta pun menyarankan masyarakat untuk segera mengonfirmasi dan melaporkan indikasi penipuan mengatasnamakan Bea Cukai ke *contact center* Bravo Bea Cukai 1500225 dan email info@customs.go.id, “Dari konfirmasi penipuan yang kami terima selama bulan Februari 2022, Bea Cukai berhasil menggagalkan kerugian material masyarakat sebesar Rp1.217.522.000 dan mata uang asing sejumlah USD6.800. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat menghindari kerugian material dari penipuan dengan cermat bertransaksi dan bijak mengonfirmasi indikasi penipuan kepada kami.”



DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI



HUBUNGI BRAVO BEA CUKAI **1500 225**

linktr.ee/bravobeacukai

www.beacukai.go.id



f @beacukaiRI

Tak hanya melalui *contact center*, menurut Hatta masyarakat juga dapat menghubungi Bea Cukai melalui saluran komunikasi resmi/media sosial, yaitu fanspage www.facebook.com/beacukaiRI, www.facebook.com/bravobeacukai, Twitter @BeaCukaiRI, Twitter @BravoBeaCukai serta Instagram @BeaCukaiRI. “Lewat media sosial, kami melakukan rekapitulasi aduan penipuan yang dialami langsung oleh korban dengan cara melaporkan penipuan tersebut melalui *google form* yang dibagikan melalui *direct message* di media sosial,” tutupnya.

Lapor SPT Manual Tinggal 4,33 Persen

Musim penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi untuk tahun pajak 2021 berakhir pada 31 Maret 2022 lalu. Namun, itu bukan berarti Wajib Pajak tidak diperbolehkan untuk melaporkan SPT-nya setelah melewati tanggal itu.

Wajib Pajak tetap bisa menyampaikan SPT Tahunannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tanggal itu sekadar tenggat kepatuhan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT. Konsekuensi yang ada jika wajib pajak menyampaikan SPT melewati tanggal itu adalah Wajib Pajak akan dikenakan denda sebesar Rp100.000,00.

Dari data yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, beberapa detik setelah pukul 24.00 WIB, tepatnya pada 1 April 2022 pukul 00:00:15 WIB, jumlah keseluruhan SPT

yang disampaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan sebanyak 11.463.802 SPT. Selisih 3.672 SPT dengan jumlah penyampaian SPT pada tanggal yang sama tahun lalu.

Jumlah 11,4 juta SPT tersebut terdiri dari 11.169.552 SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang Pribadi dan 294.250 SPT Wajib Pajak Badan. Dari jumlah 11,4 juta itu pula bisa dilihat bahwa sebanyak 495.856 SPT masih dilaporkan secara manual atau setara 4,33 persen dari total SPT yang disampaikan. Walaupun demikian penyampaian SPT secara manual ini turun daripada tanggal yang sama di tahun lalu yang jumlahnya mencapai 497.418 SPT.

Perlu diketahui, Kementerian Keuangan dari waktu ke waktu menggencarkan kampanye pelaporan SPT secara elektronik dan daring melalui beberapa saluran seperti *e-Filing DJP*, *e-Form*, *e-SPT*, dan *e-Filing Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP)*. Tiga saluran pertama diakses melalui situs web pajak.go.id. Sedangkan *e-Filing PJAP* adalah saluran penyampaian SPT Tahunan yang disediakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk

oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dari empat saluran itu, *e-Filing DJP* mendominasi saluran penyampaian SPT dengan persentase mencapai 84,83 persen dari total keseluruhan SPT yang disampaikan, tepatnya sebanyak 9.724.656 SPT. Walaupun memang angka tersebut turun daripada tahun lalu yang di tanggal 1 April 2021 terkumpul sebanyak 9.924.569 SPT.

Penurunan tersebut bisa dilacak, banyak Wajib Pajak memilih menyampaikan SPT dengan *e-Form*. Jumlah SPT Tahunan yang disalurkan melalui *e-Form* mengalami kenaikan signifikan daripada 1 April tahun lalu. Pada 1 April 2021 jumlah SPT yang disampaikan melalui *e-Form* sebanyak 725.956 SPT, sedangkan di tanggal yang sama pada tahun 2022 mencapai 1.109.928 SPT. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 52,89 persen.

Yang membedakan antara *e-Filing* dan *e-Form* adalah Wajib Pajak harus selalu daring dalam pengisian SPT melalui *e-Filing*. Sedangkan dengan *e-Form* Wajib Pajak cukup mengunduh formulir SPT dalam bentuk “.pdf” dengan login terlebih dahulu di laman

web pajak.go.id, kemudian mengisi formulir itu secara luring (*offline*), setelah itu baru mengunggah formulir tersebut di pajak.go.id.

Yang menarik lagi adalah penurunan jumlah penyampaian SPT melalui *e-SPT*. Pada 1 April 2022 jumlah SPT yang dilaporkan melalui saluran *e-SPT* sebanyak 123.608 SPT, sedangkan di tanggal yang sama pada tahun lalu jumlahnya mencapai 300.900 SPT. Bedanya dengan *e-Filing* dan *e-Form*, *e-SPT* adalah saluran penyampaian SPT Tahunan melalui aplikasi *e-SPT* dengan dokumen SPT yang dilaporkan adalah dalam bentuk “.csv”.

Penurunan ini bisa ditengarai sebagai imbas pengumuman Direktorat Jenderal Pajak pada 15 Februari 2022 yang menyatakan akan menutup saluran pelaporan SPT Tahunan melalui *e-SPT* pada 28 Februari 2022 pukul 16.00 WIB. Penutupan ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas data perpajakan. Walaupun memang sebulan kemudian tepatnya pada Senin, 28 Maret 2022, Direktorat Jenderal Pajak membuka kembali pelaporan SPT Tahunan melalui *e-SPT* untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak.

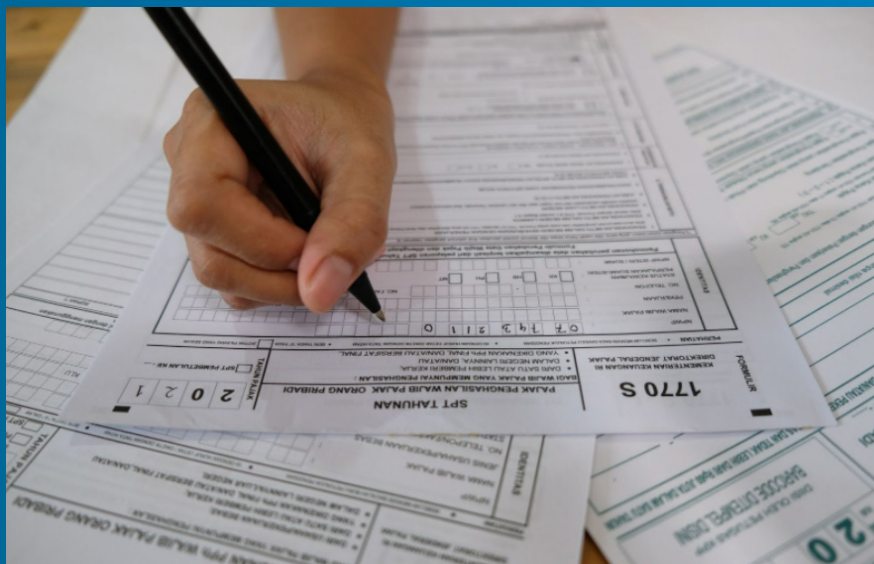
Angka 11,4 juta SPT pada 1 April 2022 ini juga mengisyaratkan bahwa Kementerian Keuangan sudah mencapai 75,12 persen target penyampaian SPT Tahunan di tahun 2022. Dari jumlah tersebut, sudah ada empat belas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang realisasinya telah mencapai 100 persen. Sementara dua puluh kantor wilayah yang tersisa masih di bawah target.

Kementerian Keuangan masih memiliki waktu sampai akhir tahun untuk mencapai 100 persen target kepatuhan Wajib Pajak melalui pelaporan SPT sebesar 15.261.320 SPT.

Pengiriman Surel

Untuk itu, April 2022 adalah waktu yang tepat untuk menggeber Wajib Pajak Badan agar segera menyampaikan SPT Tahunannya sebelum tenggat pada 30 April 2022. Ada target yang mesti dicapai sebanyak 1,65 juta Wajib Pajak Badan lapor SPT Tahunan.

Sebelumnya, sejak Februari 2022, Kementerian Keuangan telah mengirimkan surat elektronik (*surel*) secara serentak kepada jutaan Wajib Pajak yang mengingatkan tentang kewajiban penyampaian SPT Tahunan.



Kontributor: Arief Kuswanadji

Tepatnya pada 7 Februari 2022, Kementerian Keuangan mengirimkan surel kepada 2.358.038 alamat surel pemberi kerja. Mereka diminta agar segera menyiapkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 karyawannya. Ini penting karena ketika pemberi kerja segera membuat bukti pemotongannya akan membantu para karyawan untuk segera melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kemudian pada 2 Maret 2022, Kementerian Keuangan juga mengirimkan surel kepada 6.927.347 alamat surel yang isinya mengimbau Wajib Pajak Orang Pribadi untuk segera melaporkan SPT Tahunan PPh tanpa menunggu 31 Maret 2022. Terakhir, pada 3 April 2022, Kementerian

Keuangan mengirimkan surel kepada 1.940.559 alamat surel Wajib Pajak Badan yang mengingatkan Wajib Pajak Badan agar segera melaporkan SPT Tahunan PPh Badan.

Segala upaya ini belum menghitung apa yang telah dilakukan instansi vertikal Kementerian Keuangan mulai dari kantor wilayah, kantor pelayanan pajak, sampai kantor pelayanan penyuluhan, dan konsultasi perpajakan yang dengan inisiatif dan berbagai caranya mengingatkan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan antara lain melalui pengiriman SMS ataupun siaran pesan Whatsapp.

Menitip Asa pada 14 PMK

Pada 30 Maret 2022, Kementerian Keuangan menerbitkan 14 Peraturan Menteri Keuangan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Secara umum, penerbitan ketentuan ini menyesuaikan beberapa ketentuan sesuai amanat Pasal 7 UU HPP tentang perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen.

Terdapat empat klaster untuk memudahkan dalam memahami ketentuan tersebut yaitu: klaster penyesuaian kenaikan tarif PPN, klaster sinkronisasi dengan objek pajak daerah dan retribusi daerah, klaster penunjukan pihak lain sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) dan PPN, serta klaster penunjukan sebagai pemungut PPN.

Terkait penyesuaian kenaikan tarif PPN yang berlaku mulai 1 April 2022, terdapat 8 PMK yang termasuk dalam klaster

tersebut, terdiri dari:

PMK-60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKPTB) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);

PMK-61/PMK.03/2022 tentang PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri;

PMK-62/PMK.03/2022 tentang PPN atas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tertentu;

PMK-63/PMK.03/2022 tentang PPN atas Penyerahan Hasil Tembakau;

PMK-64/PMK.03/2022 tentang PPN atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu;

PMK-65/PMK.03/2022 tentang PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas;

PMK-66/PMK.03/2022 tentang PPN atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

PMK-71/PMK.03/2022 tentang PPN atas Penyerahan JKP Tertentu.

Selain itu, juga diterbitkan PMK-70/PMK.03/2022 tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai PPN. PMK ini ditujukan untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan penyelarasan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah, yang termasuk klaster sinkronisasi dengan objek pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya, untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, diterbitkan tiga PMK yang termasuk dalam klaster penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPh dan PPN, yaitu:

- PMK-58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah;

- PMK-68/PMK.03/2022 tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto;

- PMK-69/PMK.03/2022 tentang PPh dan PPN atas



Kontributor: Arief Kuswanadji

Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Terakhir, dalam klaster penunjukan sebagai pemungut PPN, terdapat dua PMK yaitu:

PMK-59/PMK.03/2022 tentang Perubahan PMK-231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Penguatan dan Pencabutan Penguatan PKP, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah;

PMK-67/PMK.03/2022 tentang PPN atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi.

Terkait penyesuaian tarif PPN, secara prinsip diatur bahwa tarif 10 persen digunakan dalam hal

saat terutang PPN (pembayaran, penyerahan, atau impor) dan faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan kedudukannya dengan faktur pajak dibuat sebelum 1 April 2022. Adapun untuk tarif 11 persen, digunakan ketika terjadi penyerahan sebelum 1 April 2022 namun dengan faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan kedudukannya dengan faktur pajak dibuat sejak 1 April 2022; atau ketika saat terutang PPN (pembayaran, penyerahan, atau impor) dan faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan kedudukannya dengan faktur pajak dibuat sejak 1 April 2022.

Menangkap Peluang

Tak dapat dipungkiri, salah satu aturan yang ditunggu-tunggu adalah tentang pajak atas transaksi perdagangan aset kripto. Hal ini merupakan konsolidasi fiskal untuk membentuk pondasi sistem

perpajakan yang lebih adil, optimal, dan berkelanjutan. Pengaturan PPN dan PPh atas aset kripto dapat mengakhiri berbagai macam diskursus yang beredar dalam masyarakat dan memberikan kepastian hukum di tengah kondisi besarnya penghasilan masyarakat dari aset kripto. Negara tidak boleh kehilangan momentum dalam menangkap potensi perpajakan tersebut, namun di sisi lain tetap harus memberikan kesederhanaan dan kemudahan administrasi pemajakannya.

Demikian pula halnya dengan potensi perpajakan dari teknologi finansial yang perkembangannya begitu pesat di Indonesia. Layanan bisnisnya yang beragam seperti layanan pinjam meminjam, penyediaan jasa pembayaran, penyelenggaraan pengelolaan investasi, layanan pendukung pasar, dan lain sebagainya, mempunyai model bisnis yang berbeda dengan jasa keuangan konvensional. Untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di bidang teknologi finansial, di dalam PMK-69/PMK.03/2022 diatur bahwa uang dalam media elektronik (*bonus point*, *top up point*), jasa penempatan dana/pemberian dana, jasa pembiayaan, dan asuransi *online*

bukan merupakan objek PPN.

Selain dukungan regulasi perpajakan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga tetap mempertahankan sepenuhnya fasilitas PPN yang selama ini berlaku. Terdapat pula penambahan fasilitas atas barang dan jasa yang semula bukan Barang Kena Pajak (BKP) dan bukan Jasa Kena Pajak (JKP) menjadi BKP dan JKP dengan kriteria dan jenis barang kebutuhan pokok yang sebelumnya telah berlaku seluruhnya dibebaskan dari PPN; pemberian fasilitas PPN dibebaskan untuk jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja; pemberian fasilitas dibebaskan untuk minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi; serta pemberian fasilitas tidak dipungut untuk emas batangan.

Dengan demikian, tercipta keadilan pajak dengan tetap memperhatikan kesehatan keuangan negara. Hal ini sangat penting sebab kenaikan tarif PPN ini diharapkan tidak terlalu memengaruhi daya beli masyarakat namun dapat menambah penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Sukuk Wakaf Ritel SWR003: Pilihan Investasi, Berkah Tiada Henti

Kini, investasi menjadi sebuah kebiasaan baru yang gencar dilakukan seiring peralihan dari *saving society* menuju *investment society*. Pilihan instrumen investasi pun beragam, menyesuaikan profil dan selera risiko para investor. Pemerintah juga turut andil dalam meningkatkan partisipasi investasi masyarakat, salah satunya melalui penerbitan SBN Ritel. SBN Ritel menjadi primadona tersendiri bagi para investor

domestik. Karena selain mudah dan menguntungkan, SBN Ritel merupakan investasi paling aman dan dijamin Undang-Undang. Melalui SBN Ritel pula, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan negara.

Inovasi Pemerintah dalam menghadirkan pilihan investasi masyarakat, tak berhenti sampai di situ. Pemerintah memiliki instrumen bernama Sukuk Wakaf, yang manfaatnya dapat dirasakan di dunia maupun berkelanjutan di

The graphic features the title 'SWR 003' in large green letters. The 'W' contains an image of a white building with a red roof. Below the letters, four people are depicted: a man in a yellow traditional outfit reading a book, a woman in a blue hijab holding a diploma, a man in a white traditional outfit sitting cross-legged, and a woman in a pink hijab with her arms raised. The text 'Pilihan Investasi BERKAH TIADA HENTI' and '#WakafkuInvestasiku' is prominently displayed. Logos for the Ministry of Finance, Bank Indonesia, Ministry of Religious Affairs, and Ministry of Social Justice and Human Empowerment are at the top left. Logos for 'Ekonomi Syariah' and 'CWLS' are at the top right. At the bottom right, logos for BSI, Bank Syariah Mandiri, CIMB Niaga Syariah, PT Mutual Bank Syariah, Bank Syariah 2, and Bank Syariah 3 are shown under the heading 'Pilihan Mitra Distribusi'.

kehidupan seterusnya. Sukuk Wakaf merupakan investasi dana wakaf uang pada sukuk negara yang diterbitkan Kemenkeu untuk pemberdayaan ekonomi Ummat dan kegiatan sosial keagamaan. Hal inilah yang membuat Sukuk Wakaf sedikit berbeda dengan instrumen lainnya, karena bagi hasil/imbalannya akan disalurkan kepada Nazhir. Sementara itu, investor dapat memilih untuk menerima kembali nilai pokoknya saat jatuh tempo (wakaf temporer) ataupun memberikan nilai pokok saat jatuh tempo kepada Nazhir untuk disalurkan sebagai wakaf (wakaf permanen). Imbalan dan/atau nilai pokok yang diwakafkan tersebutlah yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta dalam mendorong konsolidasi dana sosial Islam untuk membiayai berbagai proyek dan program sosial kemasyarakatan

nonAPBN/APBD. Melalui Sukuk Wakaf, Pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahan bagi masyarakat individu dan institusi untuk berwakaf uang dengan aman dan produktif, serta berpartisipasi langsung dalam mendukung akselerasi kekuatan ekonomi kerakyatan.

SWR003 merupakan Sukuk Wakaf Ritel ketiga yang diterbitkan Pemerintah, sejak debutnya pada 2020 silam. SWR003 akan ditawarkan mulai tanggal 11 April – 7 Juli 2022 dengan tenor 2 tahun dan tingkat imbalan tetap sebesar 5,05 persen per tahun, yang imbalannya akan disalurkan untuk program/kegiatan sosial yang memiliki dampak sosial dan ekonomi untuk masyarakat. SWR003 ditawarkan melalui 6 mitra distribusi, yang masing-masing akan dikelola oleh Nazhir dengan peruntukan yang berbeda dengan rincian sebagaimana tabel.

Rincian Nazhir Sukuk Wakaf Ritel SWR003S

Mitra Distribusi	Nazhir	Program Sosial
PT. Bank Syariah Indonesia	Yayasan BSM Umat	<ul style="list-style-type: none"> • Program Ekonomi Desa: Pembibitan Ternak Domba dan Kambing • Program Ekonomi Retail: Pengembangan Klaster Usaha Berbasis Pesantren
	LazisMU	<ul style="list-style-type: none"> • Program Sanitasi Masyarakat • Pemberdayaan UMKM
PT. Bank Muamalat Indonesia	Baitulmaal Muamalat	<ul style="list-style-type: none"> • Program Dusun Zakat – Gaduh Kambing • Program Bangun Desa Unggul – Pengembangan Usaha Ternak Kambing
	Wakaf Salman	<ul style="list-style-type: none"> • Ketahanan Energi “Pemasangan Panel Surya untuk Mesjid Salman ITB” • Ketahanan Pangan “Urban Farming Berbasis Masjid di Perkotaan”
PT. Bank CIMB Niaga Syariah	Yayasan Dompot Dhuafa	<ul style="list-style-type: none"> • Program sosial armada dakwah • Program Pengadaan alat Kesehatan
PT. Bank Permata Syariah	Wakaf Al-Azhar	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Peternak Sapi
PT. Bank Mega Syariah	Badan Wakaf Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Kemaslahatan Umum • Ketahanan Pangan
PT. Bank Syariah Bukopin	ESQ Global Wakaf: Bangkit Saudaraku	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Masyarakat melalui ternak hewan • Renovasi Rumah Ngaji • Wakaf Pangan Produktif • Wakaf Ternak Produktif • Wakaf Ekonomi Produktif • Wakaf Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Peran Indonesia dalam *Infrastructure Working Group (IWG) G20*

Tahun 2022 turut mencatatkan sejarah baru bagi Indonesia, karena di tahun ini Indonesia mendapat kehormatan sebagai Presidensi G20. G20 merupakan sebuah forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. Angka 20 menggambarkan jumlah anggota forum yang terdiri dari 19 (sembilan belas) negara dan 1 (satu) lembaga Uni Eropa. G20 dibentuk pada tahun 1999

dengan tujuan untuk mendiskusikan kebijakan-kebijakan dalam rangka mewujudkan stabilitas keuangan internasional. Forum G20 memiliki posisi strategis karena secara kolektif merupakan representasi dari 85 persen perekonomian dunia, 80 persen investasi global, 75 persen perdagangan internasional, dan 60 persen populasi dunia.

Mengusung tema “*Recover Together, Recover Stronger*”, semangat rangkaian agenda G20 kali ini adalah untuk membangun kolaborasi dan menggalang kekuatan bersama untuk pulih bersama, serta tumbuh

lebih kuat dan berkelanjutan. Presiden Joko Widodo, dalam *Opening Ceremony* Presidensi G20 Indonesia Desember tahun lalu menjelaskan bahwa Indonesia akan fokus untuk mengerjakan tiga hal, yaitu penanganan kesehatan yang inklusif; transformasi berbasis digital; dan transisi menuju energi berkelanjutan.

Salah satu agenda G20 adalah pembahasan kelompok kerja infrastruktur atau *Infrastructure Working Group* (IWG). Pertemuan IWG G20 akan berlangsung selama beberapa kali di tahun 2022 untuk membahas dan mempertajam peran investasi infrastruktur selama dan setelah pandemi serta mendorong keterlibatan sektor swasta. Tak dipungkiri, pandemi Covid-19 juga memberikan dampak pada pembangunan infrastruktur, di antaranya ada penurunan investasi untuk infrastruktur dan meningkatnya kesenjangan pembangunan infrastruktur daerah.

Empat agenda utama Presidensi Indonesia pada IWG tahun 2022, yaitu : (i) Meningkatkan investasi infrastruktur yang berkelanjutan melalui partisipasi sektor swasta; (ii) Meningkatkan inklusi sosial dan mengatasi kesenjangan daerah; (iii) Meningkatkan

investasi pada infrastruktur digital dan *InfraTech*; dan (iv) memajukan infrastruktur yang transformatif pasca pandemi Covid-19. Selain itu, pada IWG tahun 2022 akan dilanjutkan pembahasan topik Presidensi sebelumnya, yaitu pengembangan indikator *Quality Infrastructure Investment* (QII) dan penyempurnaan tata kelola *Global Infrastructure Hub* (GIHub).

Penyelenggaraan IWG dalam Presidensi G20 Indonesia 2022 merupakan momentum bagi Indonesia untuk mempromosikan investasi infrastruktur digital yang berkelanjutan, inklusif, adil, terjangkau, dan dapat diakses oleh semua negara untuk mendukung negara berkembang dan negara berpenghasilan rendah. Peran Indonesia sebagai Presidensi dalam pembahasan agenda infrastruktur penting untuk menyelaraskan kepentingan pembangunan prioritas nasional, terutama dalam penanganan perubahan iklim dan *digital backbone*, serta mendorong investasi infrastruktur yang berkelanjutan untuk menutup kesenjangan infrastruktur di daerah.

Pertemuan pertama IWG G20 dilaksanakan tanggal 20-21 Januari 2022 secara



virtual serta dihadiri oleh negara-negara anggota G20 dan beberapa lembaga internasional. Sehari sebelum pertemuan IWG G20, di tanggal 19 Januari 2022 juga dilaksanakan seminar dengan tema *“Scaling up sustainable infrastructure investment by leveraging private sector participation”* untuk membuka pembahasan agenda selama setahun dengan mengundang pihak-pihak swasta dan stakeholder infrastruktur lainnya. Melalui pertemuan pertama dan seminar ini, Indonesia berupaya untuk memperoleh masukan dari negara anggota G20 dan lembaga internasional mengenai agenda infrastruktur G20 dan hasil-hasil (*deliverables*) yang akan dicapai selama setahun ke depan yang selanjutnya

dibahas dalam pertemuan deputy dan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral.

Pertemuan IWG G20 kedua juga dilakukan secara virtual pada 17 Maret 2022. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan IWG G20 pertama dan fokus pada perkembangan penyelesaian hasil kerja yang ditargetkan sesuai rencana kerja Presidensi.

Direktur PDPPI, Brahmantio Isdijoso, sebagai Presidensi *co-chair* IWG membuka pertemuan 2nd IWG dengan menyampaikan komitmen Indonesia sebagai Presidensi G20, “Indonesia tetap berkomitmen untuk memberikan hasil nyata yang akan membantu mengatasi



dampak ekonomi global dari pandemi Covid-19 dan mencapai tujuan bersama dalam isu perubahan iklim. Pertemuan ini akan kita gunakan untuk melanjutkan progres keenam agenda IWG yang dituangkan dalam rencana kerja dan komunike bulan Februari.”

Dalam pertemuan kedua ini, Presidensi Indonesia bersama *co-chairs* dari Australia dan Brazil kembali berkolaborasi dengan GI Hub, *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), *The Global Infrastructure Facility* (GIF), *World Bank*,

Asian Development Bank (ADB), *Internasional Finance Corporation* (IFC), dan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) dan menyampaikan *update* proses penyelesaian *deliverables*. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada negara anggota untuk memberi masukan atas konsep *deliverables* yang dibangun. Pertemuan ini menunjukkan progres dalam penyelesaian *deliverables* yang nyata untuk dibahas kembali pada pertemuan IWG selanjutnya pada tanggal 9 -10 Juni mendatang.

Pemulihan
Ekonomi Berlanjut,
Penerimaan Pajak
Mencapai Rp322,46
Triliun pada
Triwulan I 2022

Penerimaan Pajak

Realisasi penerimaan pajak triwulan I tahun 2022 mencapai Rp322,46 triliun. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama tahun lalu, realisasi tersebut terbilang sangat baik. Hal ini tercermin dari tingginya laju pertumbuhan penerimaan pajak periode tersebut yang mencapai 41,36 persen (*yoy*). Tingginya angka pertumbuhan tersebut konsisten dengan tren positif laju pertumbuhan penerimaan pajak kumulatif yang terjadi sejak Mei 2021.

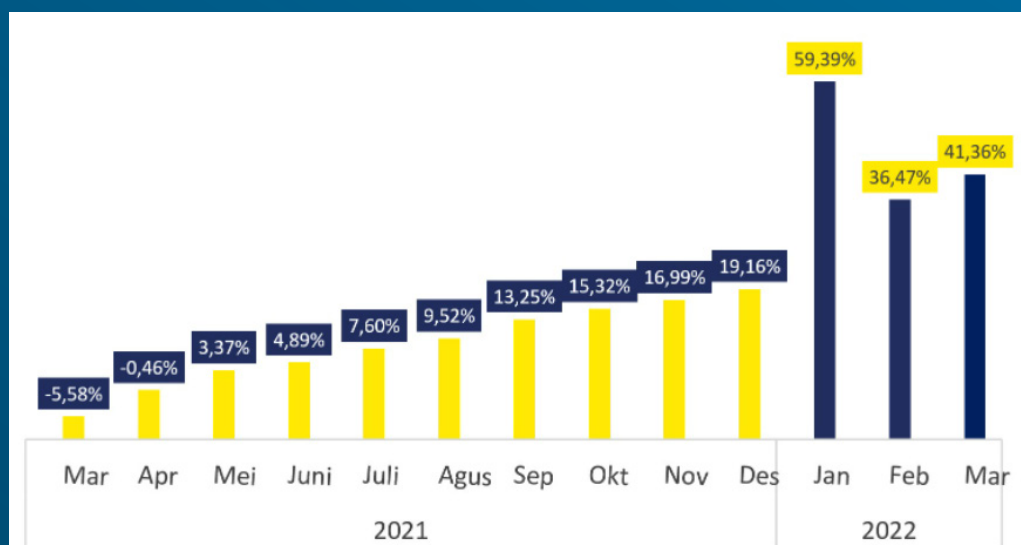
Selain itu, konsistensi kinerja positif penerimaan pajak menunjukkan bahwa sedang berlangsungnya normalisasi penerimaan pajak pasca puncak pandemi. Normalisasi pertumbuhan penerimaan pajak diharapkan berlanjut pada bulan-bulan mendatang sejalan dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi Indonesia.

Sedikitnya ada tiga faktor yang memengaruhi tingginya pertumbuhan penerimaan pajak dalam periode normalisasinya. Pertama,

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2022

Uraian	Target 2022 (Triliun)	Realisasi s.d. 31 Maret 2022		
		Rp (Triliun)	Δ% '21-'22	% Realisasi
Pajak Penghasilan (PPh)	680,88	190,02	47,74	27,91
- Non Migas	633,56	172,09	42,56	27,16
- Migas	47,31	17,94	126,79	37,91
PPN & PPnBM	554,38	130,15	34,33	23,48
PBB	18,36	0,31	7,64	1,72
Pajak Lainnya	11,38	1,97	-14,86	17,33
Jumlah	1.265,00	322,46	41,36	25,49

Pertumbuhan yoy kumulatif tahun 2021 dan 2022



kinerja penerimaan pajak yang baik sampai dengan akhir Maret 2022 ditopang oleh pemulihan ekonomi dan harga komoditas yang masih tinggi. Berlanjutnya pemulihan ekonomi terlihat dari *Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur* yang berada pada level ekspansif. Pada bulan Februari 2022, PMI Indonesia berada pada level 51,2, sedangkan pada bulan Maret 2022 PMI Indonesia mengalami kenaikan tipis 51,3 dan masih berada pada level ekspansif.

Selain itu, membaiknya perekonomian terlihat pula dari kegiatan ekspor dan impor yang meningkat. Nilai ekspor Indonesia pada Februari 2022 mencapai USD20,46 miliar, sedangkan nilai Impor Februari 2022 mencapai USD16,644 miliar. Begitu pula dengan Nilai ekspor Indonesia pada Maret 2022 yang juga tinggi USD26,50 miliar dan Nilai Impor Maret 2022 USD21,97 miliar. Sejalan dengan meningkatnya volume perdagangan internasional, kenaikan harga komoditas ekspor utama Indonesia juga masih berlanjut. Salah satunya adalah komoditas Batu Bara, Harga Batubara tercatat pada Maret 2022 mencapai USD203,69/ton.

Faktor kedua adalah *low-based effect* pada Maret 2021. Tingginya pertumbuhan sampai dengan Triwulan-I 2022 juga akibat dari rendahnya penerimaan pajak pada periode yang sama tahun sebelumnya sebagai basis penghitungan pertumbuhan. Namun demikian, sejalan dengan membaiknya basis penerimaan kumulatif sejak bulan Mei 2021, pertumbuhan kumulatif penerimaan bulan-bulan berikutnya setelah triwulan I 2022 diperkirakan akan mengalami penurunan seiring mengecilnya *low-based effect*. Ketiga, penyesuaian fasilitas perpajakan yang tidak berlaku lagi pada tahun ini berupa pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan insentif PPh Pasal 22 Impor.

Pada triwulan I 2022, seluruh kelompok penerimaan pajak utama kembali mencatatkan pertumbuhan positif dan mempertahankan kinerja memuaskannya sejak awal tahun 2022. Di sisi lain, kinerja kelompok Pajak Lainnya masih tertekan sejak awal tahun yang utamanya disebabkan oleh tidak berulangnya pembayaran ketetapan pajak yang dilakukan pada tahun lalu. Dari sisi Pajak Penghasilan, PPh Migas tumbuh mencapai 126,79

persen (yoy) pada periode sampai dengan akhir Maret 2022, sedangkan PPh Non Migas mampu tumbuh 42,56 persen (yoy). Selanjutnya kinerja PPN dan PPnBM mengalami peningkatan 34,33 persen (yoy).

Pertumbuhan Positif pada seluruh Kinerja Jenis Pajak Utama

Bila diperhatikan lebih lanjut, kinerja seluruh jenis pajak utama secara kumulatif berhasil tumbuh positif. Pertumbuhan yang sangat tinggi terjadi pada jenis pajak PPh Pasal 22 Impor dan PPh Badan. Pada jenis pajak PPh Badan, pertumbuhan mencapai 135,96 persen (yoy). Tingginya pertumbuhan jenis pajak ini merupakan akibat dari pembayaran ketetapan pajak yang besar pada Maret 2022. Sementara itu, pajak terkait dengan impor mampu tumbuh hingga 56,79 persen (yoy) dengan pertumbuhan tertinggi dialami oleh PPh Pasal 22 Impor. Kinerja PPh Pasal 22 Impor mampu mencapai

139,98 persen (yoy). Senada dengan PPh Pasal 22 Impor, PPN Impor dan PPnBM Impor juga mengalami pertumbuhan yang signifikan mencapai 41,83 persen (yoy) dan 11,42 persen (yoy). Peningkatan penerimaan pada Pajak terkait impor merupakan akibat dari aktivitas impor yang tinggi menjelang bulan Ramadhan dan setoran yang cukup besar dari jenis pajak PPN sebelum diimplementasikannya tarif PPN 11 persen.

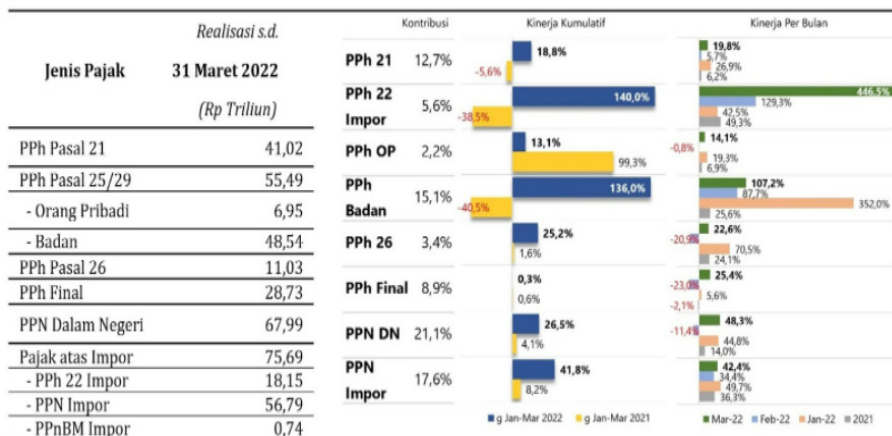
Selanjutnya, PPN Dalam Negeri (DN) tumbuh 26,50 persen (yoy) yang merupakan dampak dari pergeseran penerimaan Februari 2022 ke Maret 2022 (terdapat hari libur). Akibatnya, setoran PPN DN yang bergeser ke bulan Maret 2022 menjadi lebih besar, namun demikian apabila dampak pergeseran ini dihilangkan, PPN DN Februari dan Maret masih tumbuh positif masing-masing 10,17 persen (yoy) dan 32,47 persen (yoy). Sementara itu, jenis pajak PPh Pasal 21 tumbuh 18,76 persen (yoy)

yang kembali meningkat pertumbuhannya karena adanya pembayaran bonus kepada karyawan.

Sejalan dengan PPh Pasal 21, penerimaan PPh Orang Pribadi (OP) juga meningkat. Peningkatan tersebut merupakan dampak dari jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan PPh OP yang berakhir di 31 Maret 2022. Di samping

itu, tingginya pertumbuhan penerimaan PPh OP pada tahun 2022 merupakan akibat dari *low-based effect* di tahun 2021 dari perpanjangan jatuh tempo pelaporan SPT. Demikian pula untuk jenis pajak lainnya yaitu PPh Final dan PPh Pasal 26 yang juga masuk ke zona hijau. Setoran PPh Final mengalami kinerja yang membaik seiring dengan pemberlakuan Program

Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama



Pengungkapan Sukarela (PPS).

Secara bulanan, penerimaan mayoritas jenis pajak berhasil mencatatkan pertumbuhan yang impresif, kecuali PPnBM Impor. Penerimaan PPh Pasal 22 Impor pada bulan Maret 2022 tumbuh sangat tinggi hingga mencapai 446,49 persen (yoy) akibat pada tahun lalu masih berlaku insentif PPh Pasal 22 Impor. Begitu pula dengan pajak terkait impor lainnya yaitu PPN Impor yang tumbuh tinggi hingga 42,44 persen (yoy). Sedangkan PPnBM Impor secara bulanan masih tertekan 10,33 persen (yoy). Sementara itu, PPh Badan mampu tumbuh mencapai 107,16 persen (yoy) dan PPN juga tumbuh tinggi hingga 48,30 persen (yoy). Baiknya penerimaan dari PPN DN salah satunya tercermin dari PMI Manufaktur Indonesia yang berada di level ekspansif sejak awal tahun 2022. Terakhir, pertumbuhan PPh Final dan PPh Pasal 26 juga terlihat memuaskan senada dengan pertumbuhan kumulatifnya.

Pertumbuhan Penerimaan Neto Seluruh Sektor Tumbuh

Positif

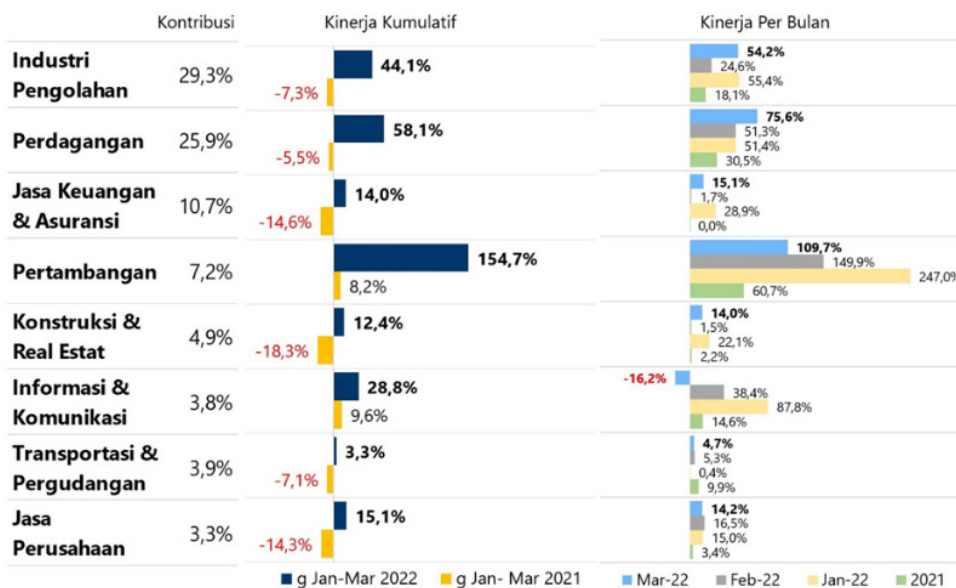
Secara kumulatif, penerimaan pada seluruh sektor utama mencatatkan pertumbuhan positif. Dua sektor utama dengan kontribusi penerimaan terbesar yaitu Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan mengalami pertumbuhan yang impresif. Sektor Industri Pengolahan, pada periode sampai dengan akhir triwulan I 2022, mampu tumbuh 44,15 persen (yoy). Pertumbuhan penerimaan pada Sektor Industri Pengolahan didorong oleh pertumbuhan penerimaan pada kelompok usaha Industri Makanan. Beriringan dengan Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan juga mampu tumbuh positif sebesar 58,12 persen (yoy). Pertumbuhan penerimaan pada Sektor Perdagangan utamanya berasal dari Subsektor Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor. Di sisi lain, Sektor Pertambangan masih melanjutkan pertumbuhan positif dengan laju pertumbuhan mencapai 154,66 persen (yoy). Baiknya kinerja Sektor Pertambangan utamanya disebabkan oleh pertumbuhan

penerimaan kelompok usaha Pertambangan Batu Bara dan Lignit.

Selain sektor yang telah disebutkan sebelumnya, sektor lainnya yang juga mengalami kinerja yang menggembirakan pada triwulan I 2022 adalah Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor Konstruksi dan Real Estate, dan Sektor Informasi dan Komunikasi. Penerimaan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi mampu tumbuh sebesar 13,96 persen (yoy) pada periode ini.

Pertumbuhan penerimaan sektor tersebut utamanya disebabkan oleh tingginya penerimaan kelompok usaha Jasa Keuangan dan Dana Pensiun. Selanjutnya, penerimaan Sektor Konstruksi dan Real Estate tumbuh sebesar 12,44 persen (yoy), sementara Sektor Informasi dan Komunikasi yang merupakan *the winning sector* di kala pandemi tumbuh 28,79 persen (yoy). Sektor lainnya dengan kontribusi tidak lebih dari 4 (empat) persen yaitu Sektor Transportasi dan

Penerimaan Pajak Sektoral



Penerimaan sektoral tanpa PPS, DTP, PBB, dan PPh Migas

Pergudangan dan Sektor Jasa Perusahaan juga masih mampu tumbuh positif.

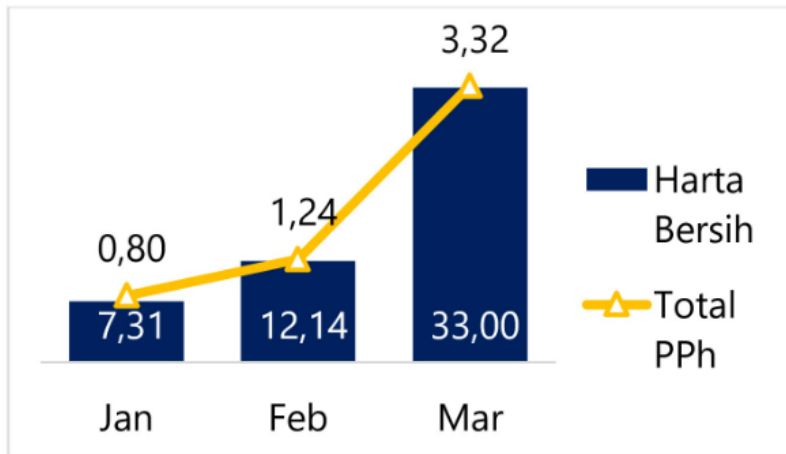
Secara bulanan, laju pertumbuhan penerimaan sektor utama masih bervariasi. Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan mengalami pertumbuhan penerimaan yang memuaskan yang utamanya disebabkan oleh peningkatan aktivitas impor. Penerimaan Sektor Industri Pengolahan mampu tumbuh 54,20 persen (*yoy*), sedangkan penerimaan Sektor Perdagangan mampu tumbuh 75,58 persen (*yoy*). Sebaliknya, Sektor Perdagangan pada bulan ini mengalami perlambatan pertumbuhan 109,70 persen (*yoy*), namun laju pertumbuhannya masih di atas seratus persen. Perlambatan pertumbuhan penerimaan juga terjadi pada Sektor Pertambangan. Perlambatan ini merupakan dampak dari meningkatnya restitusi pada bulan Maret 2022 dibandingkan dengan restitusi pada bulan Februari

2022. Berbeda dengan kinerja kumulatifnya yang mengalami pertumbuhan positif, penerimaan bulanan Sektor Informasi dan Komunikasi periode Maret 2022 mengalami tekanan. Tekanan tersebut dikarenakan meningkatnya restitusi pada bulan Maret 2022 dan tidak berulangnya penjualan Tower/Menara yang terjadi pada bulan Februari 2022.

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Telah Dimanfaatkan oleh 32 Ribu Wajib Pajak

Realisasi penerimaan pajak yang berasal dari PPS mengalami tren peningkatan sejak bulan Januari 2022 saat pertama program ini digaungkan. Pada triwulan I 2022, penerimaan tertinggi PPS tercatat pada bulan Maret 2022, dengan total PPh yang berhasil dihimpun mencapai Rp3,32 triliun, jauh lebih tinggi dari jumlah PPh yang dihimpun pada 2 (dua) bulan sebelumnya.

Tren Penerimaan PPS Per Bulan



Secara keseluruhan, capaian penerimaan PPS sampai dengan triwulan I 2022 telah mencapai Rp5,35 triliun.

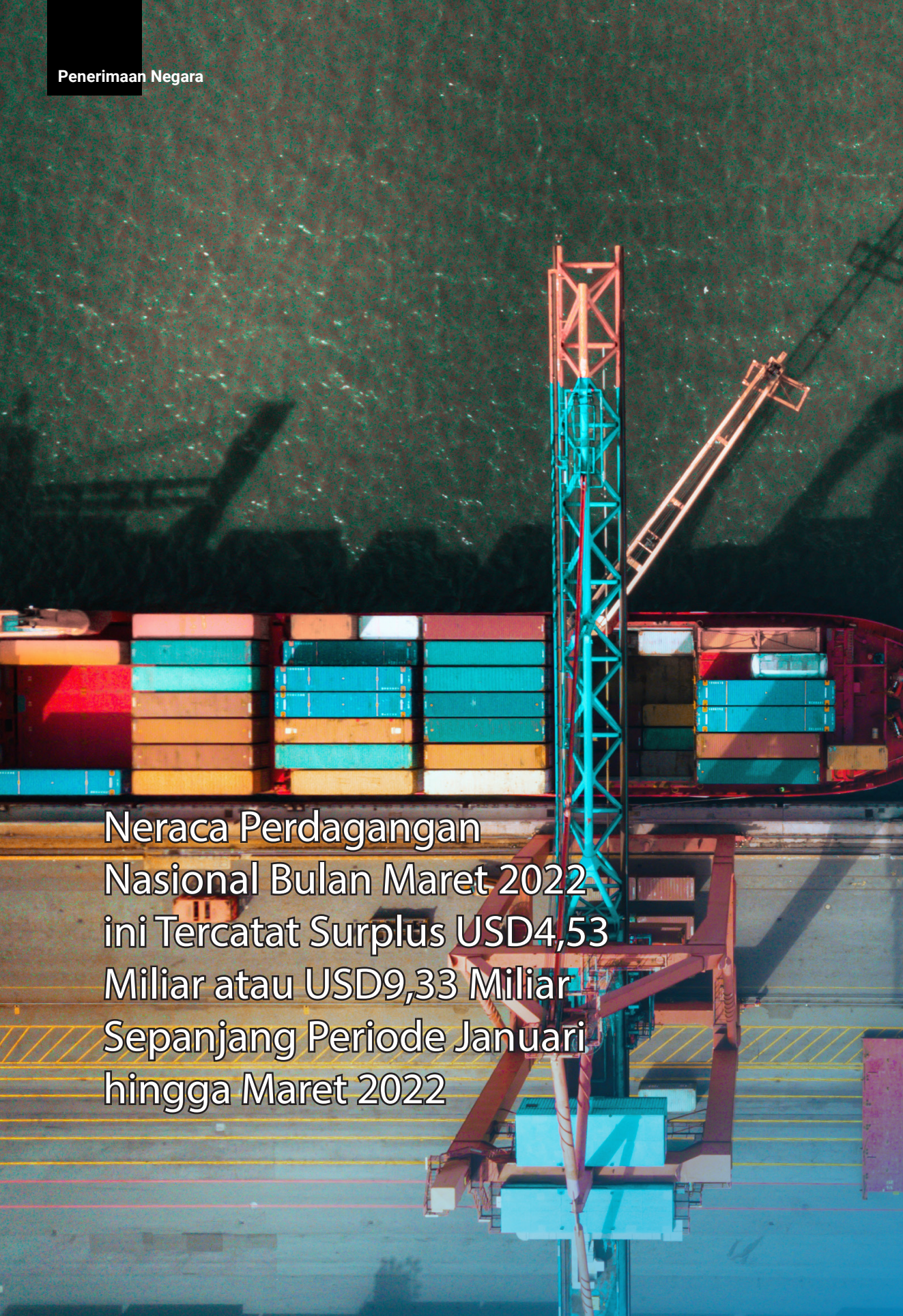
Bila dilihat lebih dalam, realisasi penerimaan PPS tersebut berasal dari 32.264 Wajib Pajak yang telah mengikuti PPS dengan menyampaikan 36.823 Surat Keterangan melalui aplikasi PPS (data 31 Maret 2022). Penerimaan setoran PPS yang terhimpun tersebut merupakan setoran atas

pengungkapan Nilai Harta Bersih yang dideklarasikan oleh Wajib Pajak dengan nilai harta mencapai Rp52,50 triliun. Sebagian besar dari harta yang diungkapkan tersebut merupakan Harta Bersih di dalam negeri dan Harta Bersih yang direpatriasi dengan jumlah gabungan mencapai Rp45,50 triliun. Selain itu, pengungkapan harta juga dilakukan atas Harta Bersih dalam bentuk Investasi yang mencapai Rp3,49 triliun

Statistik Program Pengungkapan Sukarela (PPS)



dan pengungkapan Harta Bersih di Luar Negeri yang mencapai Rp3,51 triliun. Dari harta yang telah diungkap tersebut, terdapat harta yang ditempatkan dalam instrumen SBN (Surat Berharga Negara). Nominal harta dari PPS yang ditempatkan dalam SBN adalah Rp46,35 miliar dan USD650 ribu dalam bentuk SUN (Surat Utang Negara), dan, Rp25,66 miliar dalam bentuk SBSN (Surat Berharga Syariah Negara). Untuk mendukung program PPS, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan analisis terhadap data internal maupun data eksternal untuk mengetahui Wajib Pajak yang berpotensi mengikuti PPS. Selanjutnya, DJP melalui KPP mengirimkan imbauan kepada Wajib Pajak untuk mengikuti PPS.



Neraca Perdagangan
Nasional Bulan Maret 2022
ini Tercatat Surplus USD4,53
Miliar atau USD9,33 Miliar
Sepanjang Periode Januari
hingga Maret 2022

Kepabeanaan dan Cukai

Neraca Perdagangan (NP) Indonesia pada bulan Maret 2022 tercatat surplus USD4,53 miliar atau menguat dibandingkan bulan maupun tahun sebelumnya. Kinerja ini sekaligus melanjutkan rentetan surplus 23 bulan berturut-turut sejak bulan Mei 2020. Surplus NP didorong kinerja positif neraca nonmigas yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan, namun demikian neraca migas mengalami tekanan yang

semakin dalam. Adapun aktivitas ekspor dan impor bulan Maret 2022 mengalami pertumbuhan dibanding tahun lalu.

Surplus NP dikontribusi oleh neraca nonmigas, efek masih menguatnya harga komoditas, dan permintaan ekspor dari sektor manufaktur. Kinerja neraca nonmigas didorong oleh ekspor komoditas SDA berupa batubara, bijih tembaga dan produk kelapa sawit. Sedangkan dari sektor manufaktur berupa besi baja dasar dan pakaian jadi.

Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

No.	Jenis Penerimaan	Target APBN	Realisasi		Growth (y-o-y, %)		% Capaian
			2021	2022	2021	2022	
1	BEA MASUK	35,16	8,11	11,30	-3,57%	39,24%	32,13%
2	CUKAI	203,92	49,56	57,32	70,10%	15,64%	28,11%
	Hasil Tembakau	193,53	48,22	55,65	73,92%	15,39%	28,75%
	Ethil Alkohol	0,19	0,03	0,04	-69,56%	38,14%	18,76%
	MMEA	6,80	1,28	1,60	-1,61%	25,15%	23,58%
	Denda Adm. Cukai	-	0,02	0,02	6,36%	15,22%	-
	Cukai Lainnya	-	0,02	0,01	121,47%	-32,11%	-
	Plastik & MBDK	3,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3	BEA KELUAR	5,92	4,61	10,70	534,85%	132,22%	180,88%
	TOTAL	245,00	62,29	79,32	62,72%	27,34%	32,37%
	PPN Impor		40,04	56,79	8,21%	41,83%	
	PPn BM Impor		0,67	0,74	-38,22%	11,42%	
	PPh Pasal 22 Impor		7,56	18,15	-38,55%	139,98%	
	Total PDRI lainnya		48,27	75,69	-4,20%	56,79%	
	TOTAL DJBC + PERPAJAKAN		110,56	155,00	24,69%	40,20%	

Sumber: DJPB 5 April 2022

(dalam Triliun Rupiah)

Kinerja ekspor bulan Maret 2022 jika dibandingkan dengan ekspor pada bulan Maret 2021, meningkat signifikan sebesar 44,36 persen (*yoy*). Pertumbuhan ini terutama didorong peningkatan harga komoditi global yang masih tinggi dan dibukanya kembali ekspor batubara. Kontribusi pertumbuhan terbesar berasal dari peningkatan ekspor batubara dan besi baja dasar, yang masing-masing tumbuh sebesar 147,05 persen dan 83,47 persen (*yoy*). Begitu pula apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2022, ekspor meningkat 29,42 persen (*mtm*), disebabkan naiknya volume ekspor dari sektor migas maupun nonmigas.

Secara keseluruhan ekspor nonmigas bulan Maret 2022 tumbuh 43,82 persen (*yoy*). Tren pertumbuhan ekspor yang masih positif ini terutama berasal dari sektor pengolahan dan pertambangan. Begitu juga dengan sektor migas yang mengalami peningkatan sebesar 54,76 persen (*yoy*). Pertumbuhan ekspor migas didorong naiknya ekspor gas alam dan minyak bakar ke Singapura.

Pada bulan Maret ini kinerja positif juga terjadi pada impor,

yang tercatat tumbuh sebesar 30,85 persen (*yoy*). Begitu juga dibandingkan bulan lalu, meningkat 32,02 persen (*mtm*). Kinerja tersebut didorong oleh tumbuhnya impor bahan baku, barang modal, maupun barang konsumsi, hingga sektor migas maupun nonmigas. Kinerja impor migas tumbuh 53,23 persen (*yoy*) terutama dari impor BBM dan gas alam maupun buatan. Harga minyak dunia per Maret 2022 terus mengalami kenaikan akibat gangguan pasokan energi global dari keberlanjutan konflik Rusia dan Ukraina. Permintaan bahan bakar dalam negeri meningkat sejalan dengan meningkatnya mobilitas dan peningkatan stok BBM menjelang Ramadhan dan lebaran.

Dari sisi nonmigas, impor tumbuh 27,34 persen (*yoy*) didorong pertumbuhan komoditas berupa besi baja dasar, mesin penambangan dan suku cadang kendaraan bermotor. Hal ini juga menunjukkan membaiknya kondisi ekonomi terutama industri nasional yang mendorong impor bahan baku pendukung kegiatan industri.

Peningkatan kinerja ekspor dan impor, turut memengaruhi

realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai terutama pada Bea Masuk (BM) dan Bea Keluar (BK). Hingga tanggal 31 Maret 2022, realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai mencapai Rp79,32 triliun atau 32,37 persen dari pagu APBN tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama, penerimaan ini tumbuh 27,34 persen (yoy). Capaian tersebut didorong oleh kinerja seluruh komponen penerimaan yang mengalami pertumbuhan, seperti penerimaan Cukai sebagai kontributor utama, BM yang masih tumbuh, serta pesatnya pertumbuhan BK.

Realisasi atas penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) lainnya, yang pemungutannya dilakukan bersamaan dengan penerimaan BM, hingga 31 Maret 2022 mencapai Rp75,69 triliun atau tumbuh 56,79 persen (yoy). Alhasil, total penerimaan negara yang telah dikumpulkan dari kepabeanaan dan cukai serta PDRI lainnya mencapai Rp155,00 triliun atau tumbuh sebesar 40,20 persen (yoy).

Realisasi penerimaan BM hingga bulan Maret 2022

sebesar Rp11,30 triliun atau 32,13 persen dari pagu APBN Tahun 2022. Kinerja BM mengalami pertumbuhan 39,24 persen bila dibandingkan tahun lalu, didorong kinerja impor nasional yang masih membaik. Kinerja positif penerimaan BM ini meneruskan pertumbuhan positif yang sudah terjadi sejak bulan Mei 2021.

Penerimaan Cukai per 31 Maret 2022 mencapai Rp57,32 triliun atau 28,11 persen dari targetnya, sehingga apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya Cukai tumbuh 15,64 persen (yoy). Pertumbuhan penerimaan Cukai didorong efektivitas kebijakan penyesuaian tarif yang sejalan dengan membaiknya perekonomian nasional (daya beli meningkat), relaksasi daerah tujuan wisata, dan penguatan pengawasan BKC ilegal. Penerimaan Cukai yang terdiri atas Hasil Tembakau (HT), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Etil Alkohol (EA), merupakan kontributor terbesar penerimaan Kepabeanaan dan Cukai.

Kinerja penerimaan Cukai HT hingga akhir Maret 2022 tumbuh 15,39 persen (yoy), mencapai Rp55,65 triliun


atau 28,75 persen dari targetnya. Pertumbuhan Cukai HT sudah mulai normal. Setelah pada bulan-bulan sebelumnya sempat dipengaruhi oleh limpahan penerimaan dari tahun 2021 sebagai efek PMK Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.

Realisasi penerimaan Cukai MMEA per 31 Maret 2022 masih tumbuh *double digit*, seperti bulan-bulan sebelumnya yaitu 25,15 persen (*yoy*) atau mencapai Rp1,60 triliun. Kinerja ini juga dipengaruhi oleh peningkatan produksi MMEA, khususnya produksi dalam negeri. Produksi MMEA yang berasal dari perusahaan dalam negeri memberikan kontribusi yang dominan yaitu sebesar 99,2 persen. Peningkatan produksi ini juga merupakan dampak membaiknya ekonomi nasional, terutama dari Sektor Perhotelan dan Pariwisata.

Dari sisi penerimaan Cukai atas EA hingga akhir Maret 2022 masih mengalami pertumbuhan 38,14 persen

(*yoy*), atau sebesar Rp35,65 miliar. Kinerja ini membawa penerimaan Cukai EA kembali ke pola normal. Pada tahun 2017-2019, sebelum terjadi pandemi, rata-rata penerimaan EA sebesar Rp11,41 miliar per bulan.

Kinerja penerimaan BK sampai dengan 31 Maret 2022 tumbuh signifikan 132,22 persen (*yoy*), didorong tingginya harga komoditas terutama CPO dan meningkatnya volume ekspor tembaga. Penerimaan BK mencapai Rp10,70 triliun atau 180,88 persen dari pagu APBN Tahun 2022. Penerimaan Produk Kelapa Sawit tumbuh tinggi, didorong peningkatan harga yang mengakibatkan tarif BK yang maksimal dan pengenaan BK pada produk turunannya. Sedangkan penerimaan BK Tembaga tumbuh didorong peningkatan volume ekspor dan tingginya harga tembaga.



Geliat Kenaikan
Pendapatan Sektor
Perikanan Mendorong
Penerimaan SDA
Nonmigas

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Meningkatkannya tensi geopolitik dan dampak konflik Rusia-Ukrania mengancam pertumbuhan ekonomi global yang mulai tumbuh paska pandemi Covid-19. Konflik Rusia-Ukrania secara langsung mendorong kenaikan signifikan pada harga komoditas khususnya komoditas energi. Negara yang dikarunia sumber daya alam melimpah akan mendapatkan keuntungan dari kenaikan

harga komoditas ini. Namun, bagi negara yang terbatas sumber daya alamnya harus merogoh lebih dalam lagi anggaran negaranya untuk menutupi kenaikan harga barang komoditas tersebut. Indonesia yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam turut mendapatkan tambahan penerimaan khususnya dari pertambangan mineral dan batubara.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP (Miliar Rupiah)	APBN 2022	Realisasi s.d. Maret 2022	% APBN	% Growth (yoy)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	335.555,62	99.104,55	29,53	11,81
A Pendapatan SDA	121.950,11	47.638,88	39,06	97,48
1 Migas	85.900,62	32.579,18	37,93	113,23
2 Nonmigas	36.049,49	15.059,70	41,78	70,27
a Pendapatan Pertambangan Minerba	28.011,27	13.419,63	47,91	79,64
b Pendapatan Kehutanan	4.856,96	968,51	19,94	(2,93)
c Pendapatan Perikanan	1.627,80	407,83	25,05	172,20
d Pendapatan Panas Bumi	1.553,46	263,73	16,98	16,12
B Pendapatan KND	37.000,00	142,71	0,39	10.655,10
C Pendapatan PNBP Lainnya	97.807,95	33.895,55	34,66	(16,44)
D Pendapatan BLU	78.797,56	17.427,41	22,12	(27,23)

Realisasi PNBP sampai dengan 31 Maret 2022 sebesar Rp99,10 triliun atau mencapai 29,53 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2022. Capaian ini tumbuh 11,81 persen lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 yang mengalami kontraksi 7,87 persen. Kontribusi dari Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) yang tumbuh signifikan pada sampai dengan bulan Maret 2022 mendorong pertumbuhan PNBP jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021.

Realisasi Pendapatan SDA sampai dengan 31 Maret 2022 sebesar Rp47,64 triliun atau 39,06 persen dari target APBN 2022. Realisasi tersebut disumbang dari Pendapatan SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas) sebesar Rp32,58 triliun serta Pendapatan SDA Non Minyak Bumi dan Gas Bumi (Nonmigas) sebesar Rp15,06 triliun. Realisasi Pendapatan SDA sampai dengan 31 Maret 2022 tumbuh sebesar 97,48 persen (yoy) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 yang terkontraksi 31,16 persen (yoy). Kinerja positif ini utamanya dipengaruhi kenaikan harga komoditas terutama harga minyak mentah Indonesia (ICP), mineral, dan batubara. Harga komoditas global terus meningkat. Kenaikan

yang tajam terjadi khususnya pada komoditas energi. Dampak konflik Rusia dengan Ukraina seiring terbatasnya pasokan dari negara penghasil menyebabkan harga batubara mencapai rekor tertinggi sepanjang masa. Demikian pula, harga minyak mentah juga turut melesat akibat kekhawatiran gangguan pasokan minyak dari Rusia. Peran Rusia (selaku produsen minyak terbesar ketiga dan produsen gas alam terbesar kedua dunia) dalam perekonomian internasional membuat ketidakpastian serius terhadap perekonomian global yang mengerek kenaikan harga minyak mentah.

Realisasi Pendapatan SDA Migas hingga 31 Maret 2022 sebesar Rp32,58 triliun atau mencapai 37,93 persen dari target APBN 2022. Realisasi ini tumbuh sebesar 113,23 persen (yoy) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 yang terkontraksi 46,66 persen. Kenaikan realisasi penerimaan SDA Migas pada bulan Maret 2022 ditopang oleh realisasi ICP bulan Februari 2022 sebesar USD95,72 yang penerimaannya diterima pada bulan Maret 2022. Rata-rata ICP bulan Desember 2021 sampai dengan Februari 2022 sebesar USD84,99 per barel atau naik 58,1 persen dibanding periode yang sama

tahun sebelumnya. Harga tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi ICP dalam APBN 2022 yang dipatok sebesar USD63 per barel. Capaian SDA Migas yang signifikan ini menjadi kontributor utama penerimaan PNBP periode bulan Maret 2022.

Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas hingga 31 Maret 2022 mencapai Rp15,06 triliun atau 41,78 persen dari target APBN 2022. Capaian ini tumbuh sebesar 70,27 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang tumbuh 38,14 persen. Pendapatan SDA Nonmigas sektor Pertambangan Minerba tumbuh sebesar 79,64 persen, lebih besar dibandingkan dengan periode bulan Maret 2021 yang juga tumbuh sebesar 39,46 persen. Peningkatan Pendapatan SDA Nonmigas sektor Pertambangan Minerba disebabkan meningkatnya Harga Batubara Acuan (HBA) rata-rata bulan Januari 2022 sampai dengan Maret 2022 sebesar USD183,5 per ton yang mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun 2021 (USD82,7 per ton). Nikel juga tak kalah dengan batubara ikut berkontribusi menyumbang PNBP secara signifikan. Rata-rata Harga Mineral Acuan Nikel bulan Januari 2022 sampai dengan Maret 2022 sebesar

USD21.613,5 per ton yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 (USD7.876,9 per ton). Royalti timah dan tembaga juga meningkat akibat kenaikan Harga Mineral Acuan (HMA) ketiga mineral tersebut di pasar internasional. Adapun royalti emas dan perak meningkat disebabkan kenaikan volume produksi pada bulan Maret 2022.

Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas sektor Kehutanan hingga 31 Maret 2022 mencapai Rp968,51 miliar atau 19,94 persen dari target APBN 2022. Realisasi tersebut mengalami kontraksi sebesar 2,93 persen (yoy) dibanding tahun 2021 yang tumbuh sebesar 50,91 persen. Kenaikan Pendapatan SDA Nonmigas sektor Kehutanan antara lain disebabkan adanya peningkatan realisasi produksi kayu dari sebesar 12.839.151 m³ per 31 Maret 2021 menjadi sebesar 13.081.125 m³ per 31 Maret 2022. Di samping itu, kenaikan juga disumbang dari peningkatan penggunaan kawasan hutan dari 21.475 hektar pada tahun 2021 menjadi sebesar 36.560 hektar tahun 2022. Pembayaran piutang PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) sebesar Rp129,03 miliar juga turut menyumbang peningkatan Pendapatan SDA Nonmigas sektor Kehutanan.

Adapun realisasi Pendapatan SDA Nonmigas sektor Perikanan hingga 31 Maret 2022 mencapai Rp407,83 miliar atau 25,05 persen dari target APBN TA 2022. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp149,83 miliar, realisasi Pendapatan SDA Nonmigas sektor Perikanan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 172,20 persen (yoy). Kenaikan pertumbuhan signifikan tersebut antara lain disebabkan adanya penyesuaian Harga Patokan Ikan (HPI) yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 97 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan dan penyesuaian perhitungan produktivitas kapal melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 98 Tahun 2021 tentang Produktivitas Kapal Penangkapan Ikan. Apabila dilihat lebih dalam pada masing-masing akun PNBPD SDA Perikanan, baik yang berasal dari Pungutan Perusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP), kedua penerima tersebut mengalami peningkatan realisasi yang sangat signifikan. Realisasi PPP sampai dengan 31 Maret 2022 sebesar Rp28,04 miliar (naik 1.875,84 persen)

dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun realisasi PPP hanya Rp1,42 miliar. Peningkatan ini dapat dilihat dari jumlah izin berupa Surat Izin Usaha Perikanan/Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIUP/SIKPI) yang diterbitkan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2022 mencapai 696 SIUP/SIKPI dibandingkan dengan periode yang sama hanya 273 SIUP/SIKPI. Sedangkan, realisasi PHP sampai dengan 31 Maret 2022 sebesar Rp379,78 miliar (naik 155,91 persen) dibandingkan dengan realisasi PHP pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp148,4 miliar. Kenaikan ini dapat dilihat dari jumlah SIPI yang diterbitkan pada tahun 2022 yang mencapai 1.502 SIPI dibandingkan dengan periode yang sama hanya 963 SIPI.

Selanjutnya, Pendapatan SDA Nonmigas sektor Panas Bumi sampai dengan 31 Maret 2022 mencapai Rp263,73 miliar atau 16,98 persen dari target APBN 2022. Capaian ini mengalami kenaikan sebesar 16,12 persen (YoY) karena adanya peningkatan iuran tetap dan iuran produksi panas bumi yang berasal dari setoran Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Sorik Merapi Rantau Dedap yang COD pada tanggal 26 Desember 2021,

dan penambahan kapasitas WKP Sorik Merapi Geothermal Power semula 45 MW menjadi 90 MW, serta adanya pembayaran atas tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA).


Realisasi Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sampai dengan 31 Maret 2022 sebesar Rp142,71 miliar. Realisasi ini mengalami pertumbuhan sebesar 10.655,10 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Tingginya capaian Pendapatan KND hingga bulan Maret 2022 disebabkan sudah ada setoran dividen yang berasal dari BUMN untuk tahun buku 2021, sedangkan per 31 Maret 2021 belum ada setoran dividen yang masuk untuk Tahun Buku 2020. Setoran dividen BUMN dibayarkan 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan RUPS BUMN yang biasanya mulai dilaksanakan pada akhir triwulan I. Saat ini sebagian besar laporan keuangan BUMN tahun buku 2021 masih dalam proses audit oleh Kantor Akuntan Publik. Setelah selesainya proses audit tersebut, RUPS baru bisa diselenggarakan oleh masing-masing BUMN.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya hingga 31 Maret 2022 mencapai Rp33,89 triliun atau 34,66 persen dari target APBN 2022.

Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021, capaian ini mengalami kontraksi sebesar 16,44 persen (yoy). Penurunan ini utamanya disebabkan berkurangnya PNBP yang terjadi pada objek Pendapatan dari Hak Negara Lainnya (pendapatan pengembalian belanja TAYL) dan objek Pendapatan Pengelolaan Dana (Penempatan uang di Bank Indonesia dan Bank Umum), sedangkan untuk pendapatan dari objek Layanan PNBP K/L dan objek Pengelolaan BMN mengalami peningkatan.

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sampai dengan 31 Maret 2022 mencapai Rp17,43 triliun atau 22,12 persen dari target APBN 2022. Realisasi PNBP BLU mengalami kontraksi sebesar 27,23 persen (yoy). Penurunan ini utamanya disebabkan dari berkurangnya pendapatan dana perkebunan kelapa sawit (volume ekspor CPO pada triwulan I 2021 sebesar 9.51 juta MT, sedangkan pada triwulan I 2022 hanya 6.89 juta MT) dan pendapatan layanan pendidikan (akibat adanya alih status 3 PTN BLU menjadi PTN Badan Hukum).

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan



Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada awal tahun 2022 utamanya untuk penyaluran bansos dan pembayaran kewajiban Pemerintah

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan Maret 2022 mencapai Rp314,18 triliun atau 16,16 persen dari pagu APBN 2022. Realisasi tersebut dimanfaatkan antara lain untuk penyaluran Bantuan Sosial (Bansos), serta pembayaran kewajiban Pemerintah seperti gaji dan tunjangan pegawai, pensiun, serta subsidi.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2022 (dalam triliun)

Belanja K/L

Realisasi Belanja K/L mencapai Rp149,98 triliun atau 15,86 persen dari pagu APBN 2022. Realisasi Belanja K/L ini utamanya dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pendanaan atas kegiatan operasional K/L, program kegiatan K/L untuk pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, pembayaran bantuan iuran jaminan kesehatan nasional serta berbagai program bansos.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2022

Belanja Pemerintah Pusat	APBN 2022	Realisasi s.d Maret	% thd APBN	% Growth (yoy)
Belanja K/L	945,75	149,98	15,86	(25,62)
Belanja Pegawai	266,18	50,32	18,91	3,18
Belanja Barang	337,94	42,58	12,60	(33,14)
Belanja Modal	199,20	18,73	9,40	(45,26)
Bantuan Sosial	142,43	38,35	26,93	(30,22)
Belanja Non-K/L	998,79	164,20	16,44	10,61
a.l. Belanja Pegawai	160,35	39,79	24,82	0,99
Subsidi	206,96	38,51	18,61	80,10
Total Belanja Pemerintah Pusat	1.944,54	314,18	16,16	(10,25)

(dalam Triliun Rupiah)

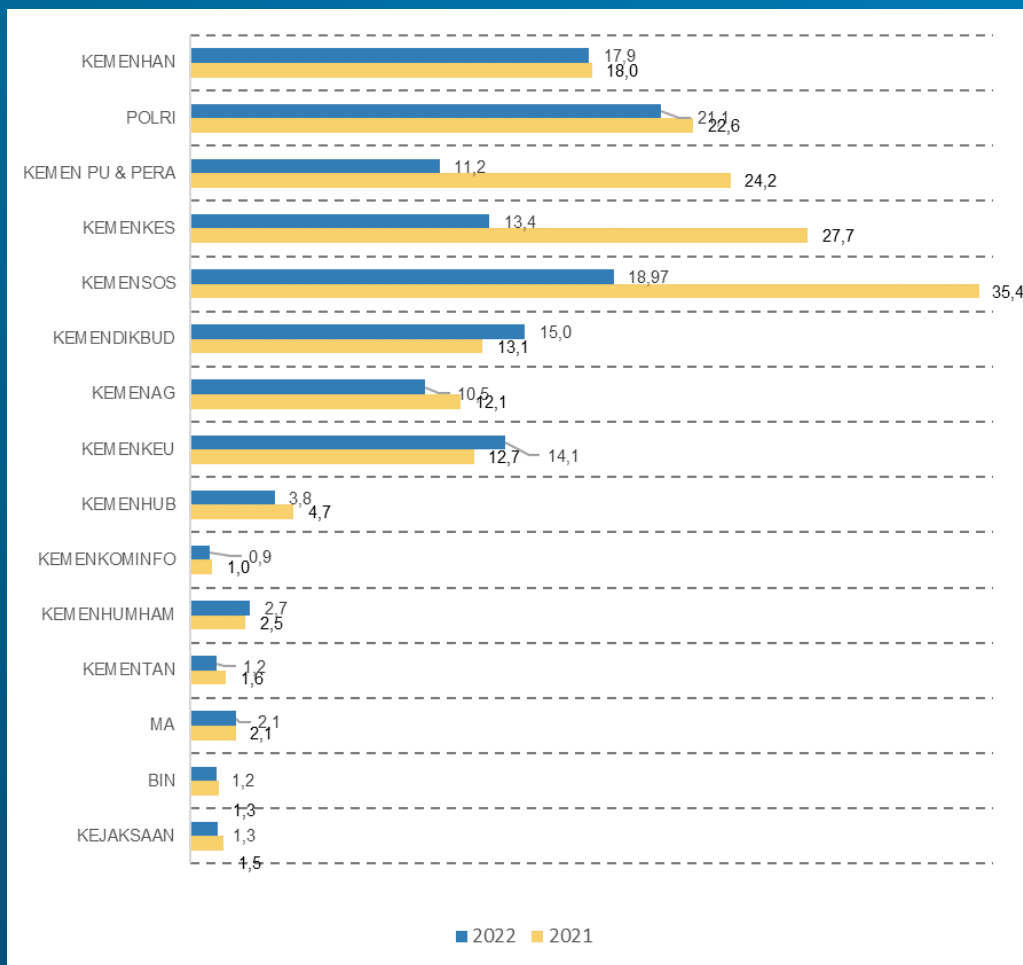
Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp50,32 triliun atau 18,91 persen dari pagu APBN tahun 2022. Realisasi belanja pegawai tersebut digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN/TNI/Polri, termasuk pembayaran tunjangan profesi guru pada Kementerian Agama.

Realisasi Belanja Barang tahun 2022 mencapai Rp42,58 triliun atau 12,60 persen dari pagu APBN tahun 2022. Meskipun realisasi belanja barang tersebut lebih rendah dari tahun 2021, namun untuk penanganan Covid-19 kondisinya sudah mulai membaik sehingga alokasi untuk anggaran kesehatan menjadi lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengendalian Covid-19 tahun 2022 di awal tahun terkendali yang ditunjukkan oleh rendahnya pasien Covid-19 dan program vaksinasi memanfaatkan pengadaan vaksin Covid-19 Tahun 2021. Selain itu, terdapat realisasi BPUM yang cukup besar pada bulan Maret tahun 2021. Faktor lain yang memengaruhi serapan belanja barang adalah rendahnya penyerapan anggaran BOS Kementerian Agama karena dampak perubahan kebijakan bank penyalur. Sementara itu, realisasi anggaran belanja barang utamanya digunakan untuk program BOS pada

siswa, BLU Kelapa Sawit, kegiatan layanan perkantoran, pengadaan sarana dan prasarana, kegiatan operasi keamanan, serta kegiatan pelayanan publik lainnya pada beberapa K/L seperti POLRI, Kementerian Pertahanan dan, Kementerian Keuangan. Selain itu, realisasi belanja barang juga digunakan untuk melanjutkan penanganan dampak Covid-19, seperti bantuan tunai untuk 491,1 ribu PKL Warung dan Nelayan dan 7,1 ribu pasien Covid yang mendapat biaya perawatan*.

Selanjutnya, realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Maret 2022 mencapai Rp18,73 triliun atau 9,40 persen dari pagu APBN 2022. Realisasi belanja modal tersebut lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 dikarenakan pada awal tahun 2021 dilakukan relaksasi pembayaran proyek pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) serta pengadaan peralatan pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Polri yang selesai di tahun 2020 ke awal tahun 2021. Apabila tidak memperhitungkan relaksasi tersebut, realisasi belanja modal tahun 2022 lebih tinggi dibanding tahun 2021. Realisasi belanja modal sampai dengan Maret 2022 mencakup: (1) belanja modal peralatan

Realisasi Belanja 15 Kementerian/Lembaga Dengan Pagu Terbesar s.d. 31 Maret 2022



TA 2021-2022 (Triliun Rupiah)

dan mesin yang dimanfaatkan antara lain untuk pengadaan/modernisasi peralatan pada POLRI dan Kemhan, (2) belanja modal gedung dan bangunan yang dimanfaatkan untuk pembangunan Gedung pada Kemhan, Kemenhub, Kementerian PUPR, dan Kementerian Agama, (3) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas pada Kementerian PUPR dan Kemenhub. Selain itu, realisasi belanja modal juga turut mendukung berbagai program PC PEN pada cluster Penguatan Pemulihan Ekonomi antara lain Ketahanan Pangan, Infrastruktur Konektivitas, Program Padat Karya, dan Pariwisata melalui Kementerian PUPR.

Realisasi Belanja Bansos sampai dengan 31 Maret 2022 sebesar Rp38,35 triliun atau 26,9 persen dari pagu APBN tahun 2022. Realisasi Bansos tersebut lebih rendah dibandingkan realisasinya pada periode yang sama di tahun 2021 yang dipengaruhi oleh tidak berlanjutnya program bansos tambahan seperti Bansos Tunai (BST) dan

percepatan pencairan bantuan program Kartu Sembako pada bulan Februari tahun 2022. Adapun pemanfaatan realisasi Bansos pada periode sampai dengan 31 Maret 2022 antara lain digunakan untuk penyaluran bantuan PKH tahap I kepada 8,2 juta keluarga, penyaluran bantuan Kartu Sembako bulan Januari s.d. Maret kepada 18,2 juta keluarga, pembayaran bantuan premi iuran JKN bagi peserta segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) kepada rata-rata 83 juta jiwa, dan penyaluran bantuan Pendidikan melalui Program Indonesia Pintar kepada 10,2 juta siswa.

Dari perspektif organisasi, realisasi belanja K/L sampai dengan 31 Maret 2022 utamanya disumbang oleh 15 K/L dengan pagu terbesar yang mewakili 90,22 persen dari total realisasi belanja K/L. Serapan tersebut utamanya didorong oleh realisasi Kementerian Pertahanan, Polri, Kementerian Sosial, dan Kemendikbudristek. K/L bidang infrastruktur mengalami perlambatan dikarenakan tidak adanya pembayaran pekerjaan akhir tahun 2021 dan belum mulainya pencairan untuk pekerjaan tahun 2022.

Belanja Non-K/L

Realisasi Belanja Non-K/L hingga 31 Maret 2022 mencapai Rp164,20 triliun, tumbuh 10,61 persen (yoy) dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2021, yang digunakan antara lain untuk pembayaran pensiun dan subsidi energi. Belanja Pegawai Non-K/L tahun 2022 terealisasi sebesar Rp39,79 triliun atau 24,82 persen dari pagu APBN 2022, antara lain digunakan untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah terhadap para pensiunan PNS/TNI/Polri dan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan aparatur negara.


Sementara itu, realisasi Subsidi sampai dengan 31 Maret 2022 naik sebesar 80,10 persen (yoy), dengan realisasi mencapai Rp38,51 triliun, terdiri dari: (a) Subsidi Energi sebesar Rp32,52 triliun, mencakup Subsidi BBM dan LPG 3 Kg serta subsidi listrik; dan (b) Subsidi Non Energi sebesar Rp5,99 triliun, mencakup Subsidi Pupuk dan Subsidi Bunga Kredit Program. Realisasi Subsidi tahun 2022 diantaranya dimanfaatkan untuk pembayaran kurang bayar Subsidi BBM dan LPG pada tahun sebelumnya. Belanja Subsidi digunakan

untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung UMKM melalui program PEN. Sampai dengan 28 Februari 2022, penyaluran BBM bersubsidi mencapai 2,66 juta Kilo Liter, LPG 3 Kg mencapai 1,21 juta MT, dan pelanggan listrik bersubsidi mencapai 38,28 juta pelanggan dengan volume konsumsi listrik bersubsidi mencapai 9,79 TWh.

Selanjutnya, realisasi penyaluran Subsidi Non Energi sampai dengan 31 Maret 2022 meliputi: penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 2,19 juta ton, Subsidi Bunga KUR diberikan kepada 2,05 juta debitur dengan total penyaluran KUR mencapai Rp93,34 triliun, dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan untuk 25,80 ribu unit rumah.

Realisasi Belanja Lain-Lain sampai dengan 31 Maret 2022 sebesar Rp1,19 triliun, utamanya untuk penyaluran Program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja dihadirkan pemerintah untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, serta mengembangkan kewirausahaan peserta/angkatan kerja. Pada tahun 2022, Program Kartu Prakerja

Halaman Ini Dikосongkan

An aerial photograph showing a winding asphalt road through a lush green valley. To the right of the road, there are terraced agricultural fields. A river flows through the valley, and a small cluster of buildings is visible in the lower-left corner. The overall scene is a rural landscape with significant infrastructure.

Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan 31 Maret 2022 telah terealisasi sebesar Rp176,46 triliun

Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan 31 Maret 2022 telah terealisasi sebesar Rp176,46 triliun atau 22,93 persen dari pagu APBN 2022, yang meliputi Transfer ke Daerah sebesar Rp165,68 triliun atau 23,61 persen dari pagu APBN 2022 dan Dana Desa Rp10,78 triliun atau 15,85 persen dari pagu APBN 2022. Jumlah tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebesar 2,02 persen (*yoy*).

A. DANA PERIMBANGAN

Hingga 31 Maret 2022, Dana Bagi Hasil (DBH) telah disalurkan sebesar Rp12,61 triliun atau 11,98 persen dari pagu APBN 2022. Jumlah ini berasal dari penyaluran DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. Penyaluran DBH lebih rendah karena pada tahun 2021 terdapat percepatan penyaluran Kurang Bayar DBH sebesar Rp 19,5 triliun. Untuk DBH Reguler, penyaluran TA 2022 sebesar Rp12,6 triliun lebih tinggi dibandingkan TA

2021 yang sebesar Rp10,56 triliun.

Realisasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) pada akhir Maret 2022 telah mencapai Rp121,04 triliun atau 32,02 persen dari pagu APBN 2022, mengalami peningkatan sebesar 16,36 persen (*yoy*). Penyaluran DAU lebih tinggi dikarenakan kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur yang lebih baik.

Hingga 31 Maret 2022, terdapat realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp92,78 miliar atau 0,15 persen dari pagu APBN 2022. Penyaluran DAK Fisik secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 25,7 persen (*yoy*) karena penyaluran DAK Fisik Penugasan yang tumbuh sebesar 111,7 persen. Sedangkan DAK Nonfisik terdapat realisasi sebesar Rp 31,43 triliun, 24,42 persen pagu APBN 2022 atau mengalami peningkatan sebesar 12,44 persen (*yoy*). Penyaluran DAK Nonfisik lebih tinggi disebabkan hampir seluruh jenis DAK Nonfisik telah disalurkan kepada daerah (hanya DAK Nonfisik BLPS yang belum disalurkan).

B. DANA INSENTIF DAERAH (DID)

Sesuai dengan ketentuan dalam PMK 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan DID dimana penyaluran DID Tahap I dilakukan paling cepat bulan Februari setiap tahunnya. Adapun realisasi penyaluran sampai dengan 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp304,40 miliar atau 4,34 persen dari pagu APBN 2022. Penyaluran DID lebih tinggi dari tahun lalu, dimana hingga akhir Maret 2022 telah dilakukan penyaluran DID tahap I sebesar 50 persen kepada 48 daerah.

C. DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA

Belum terdapat realisasi penyaluran Dana Otonomi Khusus sampai dengan akhir Maret tahun 2022. Sedangkan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta telah disalurkan sebesar Rp198 miliar atau 15 persen dari pagu APBN 2022.

DANA DESA

Sampai dengan 31 Maret 2022, Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp10,78 triliun atau 15,85 persen dari pagu. Secara

umum, penyaluran Dana Desa di bulan Maret tahun 2022 lebih tinggi Rp223,89 miliar atau naik 2,12 persen (yoy) dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2021. Hal tersebut disebabkan telah banyak pemerintah daerah yang menyampaikan pengajuan persyaratan penyaluran Dana Desa dibandingkan dengan tahun 2021.

Selanjutnya, penggunaan Dana Desa masih diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi di desa berupa pemberian BLT Desa yang telah disalurkan ke rekening kas desa sebesar Rp2,98 triliun kepada 3,31 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 32.307 desa. Realisasi tersebut meningkat signifikan sebesar Rp2,18 triliun atau 274,00 persen (yoy). Hal ini dikarenakan, Pemerintah menerapkan kebijakan penyaluran BLT Desa dilakukan secara 3 bulanan sekaligus.

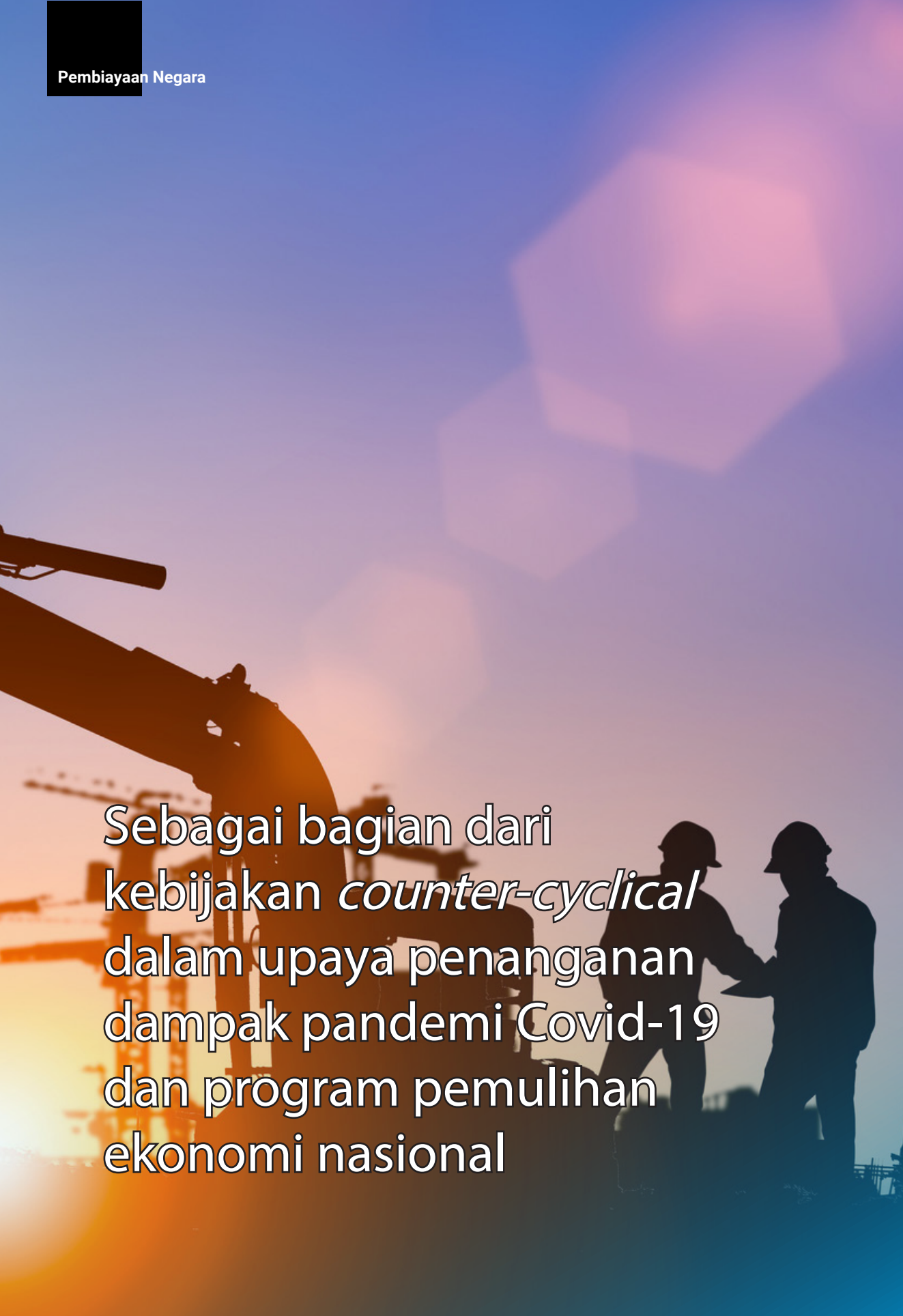
Selain itu, Dana Desa juga tetap di- *earmark* atau telah ditentukan penggunaannya untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 di level desa.

Realisasi TKDD Tahun Anggaran 2021-2022

Uraian	2021		2022		% thd APBN
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	795.479,48*	172.961,90	769.613,47	176.462,63	22,93
Transfer ke Daerah	723.479,48	162.405,84	701.613,47	165.682,67	23,61
A. Dana Perimbangan	688.676,56	162.084,48	672.857,20	165.180,27	24,55
1. Dana Transfer Umum	492.253,01	134.056,09	483.263,36	133.654,26	27,66
a. Dana Bagi Hasil	101.961,62	30.031,61	105.263,36	12.612,68	11,98
b. Dana Alokasi Umum	390.291,39	104.024,47	378.000,00	121.041,58	32,02
2. Dana Transfer Khusus	196.423,55	28.028,40	189.593,84	31.526,01	16,63
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	65.248,20	73,81	60.874,00	92,78	0,15
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	131.175,35	27.954,58	128.719,84	31.433,23	24,42
B. Dana Insentif Daerah	13.500,00	123,36	7.000,00	304,40	4,35
C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY	21.302,92	198,00	21.756,26	198,00	0,91
1. Dana Otsus	19.982,92	-	20.436,26	-	-
a. Provinsi Papua dan Papua Barat	7.805,83	-	8.805,00	-	-
b. Provinsi Aceh	7.805,83	-	7.560,00	-	-
c. Dana Tambahan Infrastruktur	4.371,26	-	4.371,26	-	-
2. Dana Keistimewaan D.I.Y	1.320,00	198,00	1.320,00	198,00	15,00
Dana Desa	72.000,00	10.556,06	68.000,00	10.779,95	15,85

Tanggal 1-31 Maret 2022 (dalam miliar Rupiah)

Halaman Ini Dikосongkan

The background of the slide features a construction site at sunset or sunrise. The sky is a gradient of blue, purple, and orange. In the foreground, the silhouettes of two construction workers wearing hard hats are visible, one holding a clipboard. To the left, the silhouette of a large piece of construction machinery, possibly a crane or excavator, is partially visible. The overall scene is backlit by the warm glow of the sun, creating a dramatic and industrious atmosphere.

Sebagai bagian dari kebijakan *counter-cyclical* dalam upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional

Pembiayaan Utang

Defisit fiskal pada APBN 2022 dianggarkan sebesar 4,85 persen, lebih rendah dari target tahun 2020 dan 2021. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk mencapai *soft landing* kebijakan fiskal. Diharapkan pada tahun 2023 defisit fiskal Indonesia dapat kembali di bawah 3 persen terhadap PDB. Kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut ditargetkan sebesar Rp868,02 triliun, terutama dipenuhi melalui pembiayaan utang sebesar Rp973,6 triliun sesuai pagu APBN 2022.

Sampai dengan akhir Maret 2022, realisasi pembiayaan utang tercapai sebesar Rp149,60 triliun atau 15,4 persen pagu APBN 2022, terdiri dari realisasi SBN (Neto) sebesar Rp133,61 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar Rp15,99 triliun. Realisasi pinjaman terdiri dari realisasi penarikan pinjaman dalam negeri sebesar Rp0,19 triliun, realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar

Rp0,47 triliun, realisasi penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp35,37 triliun dan realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp19,10 triliun.

Pembiayaan utang merupakan sebuah alat dan bukan tujuan. Pembiayaan utang diperlukan untuk menjalankan fungsi penting dan mendesak dengan lebih cepat sehingga tidak terjadi *opportunity loss*.

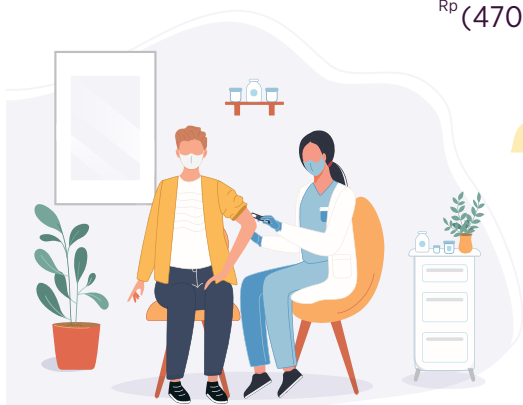
Dalam dua tahun terakhir ini, pembiayaan utang digunakan sebagai bagian dari kebijakan *counter-cyclical* dalam upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional.

Pembiayaan utang dikelola dengan *prudent*, fleksibel dan terukur dalam mendukung kelanjutan penanganan Covid-19 dan program PEN, termasuk untuk percepatan penyediaan vaksinasi secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kebutuhan pembiayaan utang akan dipenuhi melalui berbagai instrumen, untuk mendapatkan pembiayaan dengan biaya dan risiko yang minimal.

Pembiayaan Utang

hingga 31 Maret 2022

Sebagai bagian dari kebijakan *counter-cyclical* dalam upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional



Pembiayaan utang dikelola dengan *prudent*, fleksibel dan terukur dalam mendukung kelanjutan penanganan Covid-19 dan program PEN, termasuk untuk percepatan penyediaan vaksinasi secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pasar domestik, Pemerintah setiap tahunnya menerbitkan Surat Berharga Negara secara *prudent* dan disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan anggaran. Selama bulan Maret, Pemerintah melanjutkan lelang reguler Surat Berharga Negara di pasar perdana setiap minggunya, secara bergantian Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), serta tiga kali lelang tambahan (*Greenshoe Option/GSO*) yaitu pada tanggal 9, 23 dan 30 Maret 2022. Kemudian penempatan dana atas Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak pada SBN masih dilanjutkan. Transaksi tersebut dilakukan pada 30 Maret 2022 dan penempatan dana dilakukan pada instrumen SBSN seri PBS-035.

Selanjutnya, pada bulan Maret juga dilakukan penetapan hasil penjualan atas penerbitan Sukuk Negara Ritel (SR) seri SR016 yang ditawarkan pada 25 Februari s.d. 17 Maret 2022. SR016 diterbitkan dengan kupon terendah sepanjang sejarah penerbitan SBSN Ritel tradable, yaitu 4,95 persen. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya menurunkan *yield* dan menekan biaya penerbitan SBN. Meski demikian, animo masyarakat untuk berinvestasi di SR016 masih cukup tinggi. Hal ini terlihat dari total pemesanan yang mencapai Rp18,41 triliun dari 44.579 investor.

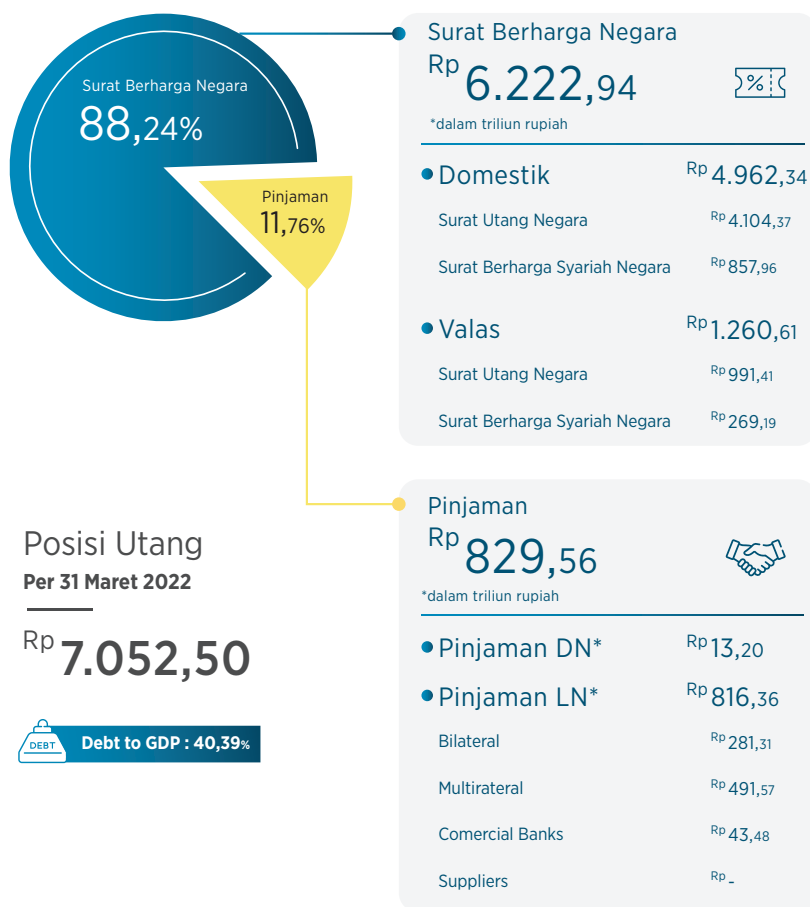
Beralih ke SBN Valas, pada tanggal 23 Maret 2022, Pemerintah berhasil menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dengan tenor 10 dan 30 tahun dalam mata USD. Di tengah berbagai tekanan seperti kondisi pasar yang masih bergejolak, tensi geopolitik Rusia-Ukraina, kenaikan suku bunga acuan *The Fed* dan tekanan inflasi global, Pemerintah berhasil menekan harga hingga 35 bps untuk tenor 10 tahun ke level ke 3,60 persen dan 25 bps untuk tenor 30 tahun ke level 4,35 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat permintaan yang kuat dari investor global di Asia, Eropa, dan AS disamping masih besarnya kepercayaan dunia Internasional kepada Indonesia. Penerbitan SBN dalam bentuk USD ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah untuk meningkatkan likuiditas pasar sekunder *Global Bond* dengan menyediakan instrumen yang dapat diperdagangkan oleh para investor global. Selain untuk tujuan pembiayaan APBN secara umum, hasil neto dari penerbitan ini akan digunakan untuk membeli kembali sejumlah *Global Bond* Pemerintah melalui transaksi *Tender Offer*.

Dari sisi pinjaman, Pemerintah telah menandatangani Perjanjian Realisasi Pinjaman Dalam Negeri pada tanggal 25 Maret 2022 dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk senilai IDR59,87 miliar yang digunakan untuk pengadaan Alat Material Khusus (Almatsus) Kepolisian Republik Indonesia.

Komposisi Utang

hingga 31 Maret 2022

Posisi utang terjaga dalam batas aman dan wajar, serta terkendali



Per akhir Maret 2022, posisi utang Pemerintah berada di angka Rp7.052,50 triliun dengan *Debt to GDP ratio* sebesar 40,39 persen. Secara nominal, terjadi peningkatan total utang Pemerintah seiring dengan penerbitan SBN dan penarikan pinjaman di bulan Maret 2022, untuk menutup pembiayaan APBN. Hasil *Article IV* yang dirilis oleh IMF pada Maret 2022 melaporkan bahwa kondisi utang Pemerintah tergolong *manageable*. Rasio utang diperkirakan stabil pada 41 persen PDB dalam jangka menengah, sepanjang aturan fiskal kembali normal di 2023, yaitu defisit 3 persen PDB di 2023 dan menurun rata-rata di kisaran 2,2 persen PDB pada jangka menengah. Sepanjang periode 2020-2021, Indonesia *Sovereign Rating* tetap stabil di tengah kondisi yang *volatile*. Lembaga *Fitch Rating* mengafirmasi peringkat pada level BBB (*outlook stable*) dan menyatakan kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih kuat serta berprospek baik. Moody's juga mempertahankan rating pada level Baa2 (*outlook stable*), dilihat dari ekonomi Indonesia yang terbukti *resilient* serta kebijakan makroekonomi dan moneter yang telah dijalankan dengan efektif. Komposisi utang Pemerintah dikelola dilakukan secara *prudent*, fleksibel dan oportunistik sehingga terjaga dalam batas aman dan wajar, serta terkendali. Berdasarkan jenisnya, utang Pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yang mencapai 88,24 persen dari seluruh komposisi utang akhir Maret 2022. Sementara berdasarkan mata uang, utang Pemerintah didominasi oleh mata uang domestik (Rupiah), yaitu 70,55 persen. Selain itu, kepemilikan SBN *tradable* oleh investor asing terus menurun sejak tahun 2019 yang mencapai 38,57 persen, hingga

akhir tahun 2021 yang mencapai 19,05 persen, dan per 12 April 2022 mencapai 17,60 persen. Dari segi jatuh tempo, total utang Pemerintah sebesar Rp7.052,50 tidak semata-mata harus dibayar secara keseluruhan pada waktu yang sama. Melainkan, komposisi utang Pemerintah dikelola dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan kapasitas fiskal. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata jatuh tempo (*average time to maturity*) sebesar minimal 7,0 tahun hingga 2025, di mana sepanjang tahun 2022 ini masih terjaga di kisaran 8,66 tahun. Pemerintah telah melakukan langkah strategis dan oportunistik, *debt switch* dan *liability management* untuk menjaga komposisi utang tetap optimal. Transaksi *debt switch* atau penukaran pada tanggal 24 Maret 2022 yang dimenangkan Pemerintah senilai Rp3,76 triliun. Hal ini untuk mengantisipasi risiko global dan mengurangi risiko jatuh tempo. Sementara transaksi *liability management* tanggal 29 Maret 2022 dengan skema *Tender Offer*, untuk membeli kembali sembilan seri *Global Bond* yang dimiliki investor, dengan tujuan lain yaitu penghematan biaya utang dari penurunan beban bunga. Meski masih diliputi ketidakpastian, pemulihan ekonomi di tahun 2022 diperkirakan akan terus berlanjut. Pemerintah terus menjaga rasio utang, dengan mengedepankan pemanfaatan pembiayaan non utang, seperti optimalisasi pemanfaatan SAL sebagai *buffer* fiskal, serta implementasi SKB III dengan BI. Upaya lain yang dilakukan Pemerintah adalah melalui pembiayaan kreatif dan inovatif untuk pembiayaan Infrastruktur dengan mengedepankan kerjasama (*partnership*) berdasarkan konsep pembagian risiko yang fair. Instrumen dari pembiayaan kreatif ini terdiri atas PPP atau KPBU, *Blended Financing* serta *SDG Indonesia One*.

